

**ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PERSYARATAN MENJADI
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN STUDI PADA
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) NOMOR 22 TAHUN
2018**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

MUHAMMAD HUSEN

NPM :1421020097

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PERSYARATAN MENJADI
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN STUDI PADA
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) NOMOR 22 TAHUN
2018**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

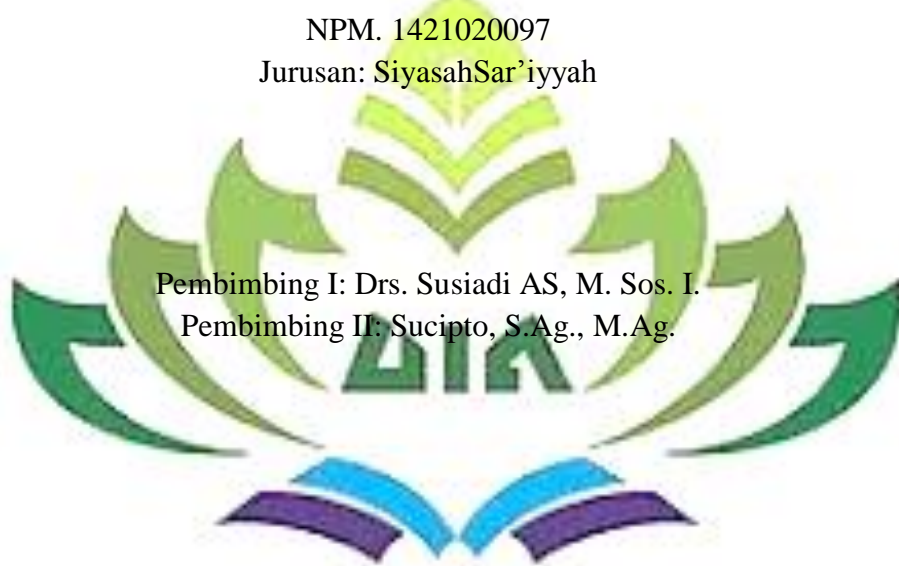
Muhammad Husen

NPM. 1421020097

Jurusan: Siyasah Sar'iyyah

Pembimbing I: Drs. Susiadi AS, M. Sos. I.

Pembimbing II: Sucipto, S.Ag., M.Ag.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

ABSTRAK

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana dalam menjalankan roda pemerintahannya dipimpin oleh Kepala Negara yaitu Presiden. Seorang Presiden beserta wakilnya dipilih melalui proses pemilihan umum, yang mana presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyatnya sendiri. Kemudian dalam Islam memilih kepala negara merupakan suatu kewajiban dan suatu kebutuhan yang sangat penting harus ada disetiap masa, karena tanpa kepala negara sebuah negara tidak dapat berjalan dengan lancar, kepala negara adalah sebuah ujung tombak suatu negara di mana jika tidak ada kepala negara, negara tersebut akan hancur dan kepala negara tersebutlah yang akan menentukan nasib maju atau tidaknya suatu negara tersebut.

Untuk menjadi seorang presiden dan wakil presiden di Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, yang mana persyaratan tersebut telah diatur oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum. Peraturan itu pun terdapat di dalam peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2017 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Kemudian dalam Islam pun untuk menjadi seorang pemimpin orang tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Mawardi yaitu: *pertama*, Adil berikut Syarat-syarat yang menyeluruh. *kedua*, memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu beristihd di dalam berbagai kasus dan hukum, *ketiga*, memiliki panca indra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani segala persoalan yang diketahuinya. *Keempat*, memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat. *Kelima*, memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan. *Keenam*, memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh. *Ketujuh*, memiliki nasab dari silsilah suku Quaisy, berdasarkan nash dan ijma.

Penelitian ini didasari pada keinginan penulis tentang Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap syarat-syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden di dalam peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2017. Yang bertujuan untuk mengetahui analisis fiqh siyasah terhadap peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2017 yang mengatur tentang persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden. Jenis penelitian ini termasuk penelitian "*library Research*" data diambil dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan yaitu mencari data mengenai obyek penelitian dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variable tertentu yang berupa catatan dan buku-buku, karya ilmiah, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan.

Dari hasil penelitian ini ditemukan dan disimpulkan bahwanya secara garis besar analisis peneliti mengenai persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat di dalam Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2017 terhadap persyaratan-persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden telah

mengandung kaidah-kaidah hukum Islam, yang dicetuskan oleh Imam Al-Mawardi, Al-Farabi, Al- Ghazali, Ibn Taimiyah dan lain sebagainya. Hal ini menjadi begitu penting karena terjadinya keselarasan antara peraturan yang bersifat positif dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh nash. Tidak lupa pula bahwasannya hukum Islam berfungsi sebagai landasan dalam pembentukan Undang-Undang atau Peraturan yang telah dibentuk manusia.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Muhammad Husen
NPM : 1421020097
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Persyaratan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden Studi pada Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. Susiadi AS, M. Sos. I.
NIP.195808171993031002

Pembimbing II

Sucipto, S.Ag., M.Ag.
NIP.196612271995031003

Mengetahui

**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
(Siyasah Syar'iyah)**

Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP.197111061998032005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PERSYARATAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN STUDI PADA PERATURAN KPU NOMOR 22 TAHUN 2018** disusun oleh Muhammad Husen, NPM : 1421020097, Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr.Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. (.....)

Sekretaris : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H (.....)

Penguji Utama : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M. (.....)

Penguji Pendamping I : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I. (.....)

Penguji Pendamping II : Sucipto S.Ag., M.Ag. (.....)



DEKAN
Khairuddin, M.H.
NIP.196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Surah An Nisaa’ Ayat 59)¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahanny*, (Jakarta: yayasan penyelenggaraan penterjemah al-Qur'an,) h.87

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, ku persembahkan karya ilmiah ini kepada orang yang selalu mencintai dan memberi makna dalam hidupku terutama bagi:

1. Kedua orang tua ku Ayah handa M.Ali dan Ibu Marheti yang selalu setia memberikan pengorbanan selama ini dalam mendidik, membimbing, membesarkan dengan penuh kasih sayang dan selalu mendo'akan untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan studi.
2. Kakak-kakak ku Sures Miyati, Tini Ariani, Tina Ariana yang telah memberiku semangat dan membatuku agar terselesaikannya skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat seperjuanganku Aditya Pratama, Gagas Prabowo, Sahrudin, Miftahul Ilmi, Alif Ramadhani, Rio Langgeng Martopo, Mufleh Haja, Ahmad Khotib, Haris Wanto, Muazza Turomi dan khususnya kepada anak-anak Siyasah B Angkatan 2014, yang telah menemani baik suka maupun duka serta telah membantu pemikiran maupun tenaga dan motivasi sehingga dapat terselesainya skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang ku banggakan tempatku menuntut ilmu, telah mendewasakanku dalam berfikir, bertindak serta memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk masa depanku.

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Husen, dilahirkan pada tanggal 19 Agustus 1995 di Desa Banjar Harum, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara. Anak ke Empat dari Empat bersaudara dari Bapak M.Ali dan Ibu Marheti.

Pendidikan yang pernah ditempuh :

1. SD Negeri 03 Sindang Sari, Tamat Tahun 2008
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 06 Kotabumi, Tamat Tahun 2011
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 02 Kotabumi, Tamat Tahun 2014
4. Pada Tahun 2014 Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dengan Konsentrasi pada Jurusan Hukum Tata Negara.

2019

Bandar Lampung, 04 Oktober

Yang membuat

Muhammad Husen

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan penelitian penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Persyaratan Menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden Studi pada Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018**”. Selawat dan salam disampaikan pada Nabi Muhammad SAW, Para Sahabat, dan Para Pengikutnya yang setia.

Alhamdulillah, Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan (Pendidikan) Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Proses penyelesaian skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Atas bantuan dari semua pihak tak lupa penulis ucapkan trimakasih yang sedalam- dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. KH. Khairudin Tahmid, M.H, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap pada kesulitan Mahasiswa.
3. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H Selaku Ketua Jurusan Siyasah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Frenki, M.Si., Selaku Seketaris Jurusan Siyasah yang senantiasa mengarahkan mahasiswa dalam proses pengajaran yang baik.
5. Drs. Susiadi AS., M. Sos.I., Selaku pembimbing 1 yang selalu meluangkan waktu serta memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Sucipto S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing 2 yang telah menyediakan waktunya serta memberikan arahan, saran dan bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Para Staf Kariawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah membantu dan memberikan banyak pengetahuan kepada saya selama kuliah.
8. Kepala dan Karyawan Perpustakaan Pusat dan Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data dan refrensi.
9. Teman-teman Siyasah B Angkatan 2014, yang mengawali hari-hari di kampus dengan penuh kebersamaan dan semangat.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran serta bimbingan yang arif untuk membangun sehingga dapat membantu kami dalam penyempurnaan penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya. Amin

Kepada Allah SWT Penulis memohon ampun, rahmat, hidayah dan inayah-nya. Semoga Allah mengampuni dosa, kesalahan kita dan meridhoi amal baik dan jasa dari semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, serta kepada setiap pembaca semoga memperoleh manfaatnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xiii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------------|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 2 |
| C. Latar belakang masalah..... | 3 |
| D. Rumusan masalah..... | 12 |
| E. Tujuan dan manfaat penelitian..... | 12 |
| F. Metode penelitian..... | 13 |
| G. Analisa Data..... | 16 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Kajian Teori..... | 17 |
| 1. Pengertian Fiqih Siyasah dan sistem pemerintahan dalam islam... | 17 |
| 2. Pengertian Kepala Negara dalam Fiqih Siyasah | 26 |
| 3. Hukum mengangkat Pemimpin dalam Fiqih Siyasah | 29 |
| 4. Syarat-Syarat Pemimpin berdasarkan Fiqih Siyasah | 34 |
| 5. Cirri-Ciri Pemimpin menurut Fiqih Siyasah | 35 |
| 6. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin dalam Fiqih Siyasah..... | 38 |
| B. Hasil Penelitian Terdahulu | 41 |
| 1. Vera Agus Indriani | 42 |
| 2. Mawardi | 43 |
| 3. Riska Indriani Mawaruddani | 44 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum | |
| 1. Pengertian Pemilihan Umum | 45 |
| 2. Dasar Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia..... | 47 |
| 3. Tujuan Pemilihan umum | 51 |
| 4. Asas-asas dalam Pemilihan Umum | 54 |
| 5. Sistem Pemilihan Umum..... | 57 |
| B. Deskripsi Data Penelitian | |
| 1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU) | 60 |
| 2. Sejarah terbentuknya Komisi Pemilihan Umum | 61 |
| 3. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum | 68 |
| 4. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 Tentang pencalonan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden..... | 70 |

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Analisis fiqh siyasah terhadap di dalam peraturan KPU No 22 Tahun 2018 yang tertera dalam pasal 9 tentang syarat-syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden. | 77 |
|--|----|

BAB V. PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 87 |
| B. Saran | 88 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam rangka mempertegas pokok bahasan penelitian ini perlu dijelaskan istilah yang ada pada judul berikut ini yakni **“Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Persyaratan Menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden Studi pada Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018”**. Dengan adanya penjelasan yang ada pada judul tersebut diharapkan dapat menghilangkan kesalahpahaman pembaca dalam memahami bahan kajian selanjutnya. Adapun istilah-istilah yang perlu penjelasan adalah sebagai berikut:

1) Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara).

2) Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²

3) Calon Presiden (Capres)

Calon Presiden adalah seseorang yang mencalonkan kepala Negara sebagai penguasa dalam menjalankan kewenangan dan kekuasaan untuk

² Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah-Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 4.

mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu Negara yang bertanggung jawab bersama-sama memikul untuk menggunakan kekuasaan yang terbatas.

4) Calon wakil Presiden (Cawapres)

Calon Wakil Presiden adalah seseorang yang mencalonkan Wakil Kepala Negara sebagai penguasa dalam menjalankan kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu Negara yang bertanggung jawab bersama-sama memikul untuk menggunakan kekuasaan yang terbatas.

5) Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu.³

6) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018

Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 merupakan peraturan tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

B. Alasan Memilih judul

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara objektif dan subjektif adalah sebagai berikut :\

1) Secara Objektif

Pentingnya meneliti/menulis masalah yang akan diteliti terkait dengan judul diskripsi, dikarenakan di dalam peraturan KPU Nomor 22

³Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum, pasal 1

Tahun 2018 pasal 09 telah mengatur syarat-syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan didalam Islampun sudah diatur secara jelas dan tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadits tentang syarat-syarat menjadi kepala Negara, namun demikian persyaratan menjadi pemimpin dalam Islam belum dijadikan acuan dasar terhadap pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, untuk itu adanya penelitian ini dalam upaya melihat bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap syarat-syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden dalam peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 yang tertera di pasal 09.

2) Secara Subjektif

- a. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis pelajari saat ini, yakni berhubungan dengan jurusan Siyasah atau Hukum Tata Negara.
- b. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, mengingat adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai serta data dan informasi lain nya yang berkaitan dengan penelitian baik data sekunder maupun data primer.

C. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang sistem pemerintahannya yaitu sistem presidensial dimana dalam menjalankan roda pemerintahan ini menggunakan sistem pemilihan presiden untuk mendapatkan kepala negara yang dipilih oleh rakyatnya secara langsung. Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa seseorang pemimpin yang dapat melindungi seluruh rakyatnya dari

masalah dan bahaya baik yang timbul dari dalam negara itu sendiri maupun masalah yang dari luar.⁴

Pemilihan Umum yang bisa disebut juga dengan "Political Market" adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (masyarakat) yang memilih hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan aktifitas politik.⁵

Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem politik atau negara. melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan penyaringan calon-calon tersebut. pada hakikatnya pemilu di negara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu, berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin Negara. Pemimpin yang dipilih itu menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.⁶

Sistem pemilu di Indonesia pada undang-undang dasar 1945 sebagai landasan utama dan undang-undang lainnya yang lebih terperinci yakni undang-undang 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang digantikan dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

⁴ Munjar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama Erlangga:2008), h. 96.

⁵ Janediri M. Gaffar, *Politik hukum Pemilu* (Jakarta : Konstitusi press, 2012), h.56.

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenada Media Group,2010), h. 332.

pemilihan umum. Landasan hukum tersebut mencerminkan system demokrasi Indonesia yang telah tertanam dan terus di perbaharui.⁷

Dalam segi kelembagaan, sistem pemilu di Indonesia ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU). KPU merupakan lembaga konstitusional yang berkerja secara independen untuk menyelenggarakan pemilihan umum nasional dan lokal. Ketua dan anggota KPU pusat terdiri dari 7 anggota yang dipilih melalui proses seleksi yang ketat dan kemudian dilantik oleh Presiden untuk jangka waktu lima tahun. Begitu pula dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dipilih melalui proses seleksi yang dilantik oleh Presiden dengan keanggotaan pada tingkat nasional sebanyak lima orang. mereka bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja KPU dan keseluruhan proses pemilu dari pra hingga pasca.

Pada hakikatnya, KPU memiliki peran dalam melaksanakan pemilu secara umum. Pertama, KPU harus memerankan wewenangnya secara tepat dalam mengatur tahapan pelaksanaan pemilu (*electoral regulation*). Sehubungan dengan hal tersebut, KPU harus mampu menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan umum dan mengimplementasikannya dalam pemilu sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. KPU juga harus mampu melakukan bentuk regulasi, yaitu melengkapi dirinya dengan perangkat peraturan sekaligus menegakkannya dan kemudian mengkomunikasikannya kepada peserta pemilu dan masyarakat.

⁷ Farahdiba Rahma Bahtiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari berbagai Refresmentasi". *Jurnal Politik Propetik*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2014, h. 7

Kedua, KPU harus memerankan dirinya secara proposional sesuai dengan wewenangnya dalam melaksanakan seluruh kegiatan selama proses pemilu (*electoral process*). dalam hal ini, KPU harus memerankan dirinya secara tetap dalam merencanakan, mensosialisasikan, mengadakan kerjasama dengan lembaga lain, dan sebagainya. *Ketiga*, KPU harus memerankan dirinya sesuai dengan wewenang dalam mengawasi serta menegakan peraturan pelaksanaan pemilu (*electoral law enforcement*). Dalam hal ini, KPU harus mampu memerankan dirinya sebagai lembaga independen yang mampu membuat peraturan atau keputusan berdasarkan undang-undang yang berlaku. dalam wujud konkretnya, KPU harus memerankan dirinya secara tepat sehingga peraturan dan keputusan itu dapat diterima sebagai rujukan pengontrol ketika pelaksanaan pemilu, dengan demikian KPU harus menegakan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, misalnya dalam mengawasi, mengatur, memberikan sanksi kepada peserta pemilu, dan sebagainya demi terlaksananya pemilu yang partisipatif.⁸

Komisi Pemilihan Umum dalam wewenangnya telah menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi bakal calon presiden dan calon wakil presiden untuk mendaftar ke KPU pada peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 pada pasal 09 yang berbunyi :⁹

- 1) Syarat untuk Menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

⁸ PKK Universitas Kanjuruhan Malang, "Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2009), h.54-55.

⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Pasal 09 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
- c. Suami/istri calon Presiden dan suami/istri calon Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia.
- d. Tidak pernah mengkhianati Negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter dan Badan Narkotika Nasional.
- f. Bertempat tinggal di wilayah Negara kesatuan Negara Republik Indonesia.
- g. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara Negara.
- h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara.
- i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD.
- l. Terdaftar sebagai pemilih.
- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang di buktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
- n. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.
- o. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- p. Tidak pernah di jatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (tahun) atau lebih.
- q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh lima) Tahun.
- r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA),madrasah aliyah (MA) sekolah menengah kejuruan (SMK) madrasah aliyah kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
- s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang partai komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau organisasi terlarang lain menurut Peraturan Perundang-Undangan; dan
- t. Memiliki visi, misi dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara republik Indonesia.

- 2) Bagi bakal yang bersetatus sebagai pejabat negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, atau karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, wajib mengundurkan diri.
- 3) Persyaratan pengunduran diri sebagai pejabat negara yang dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pimpinan atau anggota DPR, pimpinan atau anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota.
- 4) Persyaratan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- 5) Disabilitas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.

Yang menjadi fokus penelitian hanya mengambil lima (5) syarat, yang terdapat pada ayat (1) untuk disesuaikan di dalam persyaratan-persyaratan di dalam Hukum Islam, persyaratan yang dimaksud yaitu :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- c. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter dan Badan Narkotika Nasional.

- d. Tidak pernah mengkhianati Negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
- e. Memiliki visi, misi dan program dalam melaksanakan pemerintah Negara republik Indonesia.

Pemilu yang dipraktekan di Indonesia khususnya, dan di belahan dunia pada umumnya, merupakan praktek ketatanegaraan yang harus dilakukan, yang selain sebagai implementasi kedaulatan rakyat juga berfungsi untuk memilih wakil-wakil rakyat dan memilih pemimpinnya. Akan tetapi apabila dikaji secara mendalam, praktek pemilu menurut hukum Islam sebenarnya sudah menyimpang dari ketentuan syariah, meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa wajib hukumnya untuk memilih dan haram hukumnya apabila tidak memilih (Golput).

Menurut Al-Ghazali tentang syarat pemilihan pemimpin adalah sifat *wara* ‘ yaitu berbudi perketi luhur, ada pun masalah-masalah hukum dan syari’at Islam dia bisa mengembalikannya kepada para ulama dan para cendikiawan yang terpandai pada zaman nya, dan dalam mengambil keputusan didasarkan kepada pendapat dan urusan mereka itu.¹⁰

Tokoh-tokoh tersebut seperti Al-Marwardi, Al-Ghazali, Abu Ja’la al-Hambali mensyaratkan suku Quraisy sebagai calon Pemimpin, sebab suku Quraisy tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pemimpin yang tangguh. Karena itu tidak sah menurut hukum mengangkat kepala pemerintahan diluar golongan itu. Al-

¹⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1990), h.78.

Baqillani menambahkan syarat tersebut berdasarkan hadits Rasullulah saw, “para Pemimpin dari Bangsa Quraisy”.¹¹

Dalam mengangkat atau memilih Pemimpin menurut Ibnu Taimiyah haruslah memenuhi kreteria sebagai berikut:

1. Mengangkat yang *Ashlah* (paling layak dan sesuai)
2. Memilih yang terbaik kemudian yang dibawahnya.

Dalam pandangan Islam yaitu (Fiqh Siyasah), pemilu adalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara yang biasa digunakan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin. Meskipun hukum asal pemilu itu sebagai Uslub adalah Mubah (boleh), tetapi perlu diketahui bahwa pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan ketentuan syariah. dalam pemilu legislatif, uslub itu digunakan untuk memilih wakil rakyat dengan tugas membuat undang-undang dan harus sesuai dengan ketentuan syariah, tidak berdasarkan suara mayoritas serta melakukan checks and balancies terhadap kekuasaan lainnya. Begitu juga dalam pemilihan kepala Negara dan kepala daerah, Uslub ini digunakan untuk memilih orang yang memenuhi syarat sebagai pemimpin.

Imam Al-Mawardi, menyatakan metode atau cara pengangkatan pemimpin dalam fiqh siyasah bahwa para ulama sepakat akan pengangkatan seorang Pemimpin dengan cara kesepakatan *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* dan penunjukan atau wasiat oleh pemimpin sebelumnya.¹²

1. *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* sebagai dasar sebagai sistem pemilihan dan pengangkatan menurut Ahlu Sunnah Al-Jamaah. jika seorang pemimpin

¹¹ Suyuti Pulungan, *Hukum Tata Negara Islam*, (Jakarta, Raja Wali,1997), h.256.

¹² Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, terjemahan Khalifurrahman Fath & Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h.12

wafat, atau di copot dari jabatannya, menjadi kewajiban bagi *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* untuk memberikan bai'at kepemimpinan. *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* itu sendiri merupakan suatu metode pemilihan calon pemimpin yang dipilih oleh orang berkompeten dalam bidangnya berkumpul bersama dalam sebuah forum.

2. Wasiat

Wasiat apabila ada seorang pemimpin memberikan penunjukan kepada seseorang untuk menduduki jabatan khalifah setelahnya, maka hal itu di benarkan oleh syariat, selama syarat-syarat bagi seorang khalifah terpenuhi pada diri orang yang di tunjuk. Demikian pula, kebolehan baginya menyerahkan jabatan khalifah sesudahnya pada majelis syura dalam jumlah terbatas yang di tunjuk olehnya.

Dengan demikian, syarat menjadi Pemimpin dalam pandangan Islam dapat dipergunakan sebagai salah satu cara dalam kehidupan kenegaraan, apabila Negara yang bersangkutan telah memilih jalan demokrasi sebagai satu-satunya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Akan tetapi, demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi yang sesuai dengan ketentuan syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat disimpulkan bahwa yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap syarat-syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden di dalam peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 yang tertera dalam pasal 09 ayat satu (1)

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui analisis fiqh siyasah terhadap peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 yang mengatur tentang persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritisnya adalah untuk memperkaya pengetahuan hukum Konvensional dan hukum Islam di bidang politik Islam, untuk memaksimalkan peraturan KPU terhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan sebagai acuan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang system politik Islam.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktisnya secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dan informasi bagi semua pihak khususnya

bagi masyarakat. sehingga hasil yang dikumpulkan dapat optimal dan disalurkan dengan baik.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. Penelitian digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan, mengembangkan, menemukan dan menguji kebenaran. Untuk memecahkan suatu permasalahan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan metode tertentu, supaya mendapatkan hasil yang maksimal maka peneliti menggunakan jenis penelitian sebagai berikut:¹³

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi, dengan berbagai macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan. Yaitu dengan metodologi kepustakaan (*library research*) atau riset yang dilakukan membaca buku, majalah, makalah, serta sumber lain yang tersedia dan berkaitan dengan judul yang dimaksud. dalam hal ini penelitian yang menekankan sumber utama informasinya dari buku-buku tentang pemilihan Presiden dan Wakil presiden di Indonesia, khusus nya

¹³ Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, (Lampung : LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.21

Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018, dan juga buku-buku tentang Pemilihan Kepala Negara dan Ketatanegaraan islam.

b) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, merupakan penelitian dengan memaparkan seluruh data kemudian menganalisis secara detail sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya. Pada penelitian ini menjelaskan gambaran umum tentang Analisis terhadap peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 terhadap syarat-syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden kemudian di analisis berdasarkan dengan Prespektif Fiqih Siyasah.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, Dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan pustaka untuk menggambarkan fakta secara objektif, baik literatur primer maupun skunder yang menjadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah.

Adapun sumber datanya dapat dikategorikan menjadi dua yaitu :

a. Data Primer

Bahan primer yaitu bahan utama dalam penelitian, yaitu studi pustaka yang berisikan tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, dalam hal ini peneliti menggunakan “ Peraturan KPU No.22 Tahun 2018 “.

b. Data Skunder

Bahan Skunder yaitu bahan yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Dalam hal ini buku-buku atau artikel serta skripsi terdahulu dan pendapat para pakar yang berkaitan tentang bakal Calon Presiden dan wakil Presiden yang terkena putusan pengadilan berkekuatan tetap dan ketatanegaraan Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran kepustakaan, yaitu mencari data mengenai obyek penelitian. Dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variable tertentu yang berupa catatan dan buku-buku. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, Mencatat, Mempelajari, dan menganalisis data-data yang berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan judul.

H. Metode Pengolahan Data

Secara Umum pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:

1. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis. Dan memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan di teliti setelah data tersebut terkumpul.
2. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu bersumber dari Al-Qur'an dan hadist, atau buku-buku litelatur yang sesuai dengan masalah yang di teliti.

3. Rekontruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.¹⁴

I. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain¹⁵.

Menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menjelaskan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk *library research* dan uraian deskriptif.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 243-266

¹⁵ Sugiyono, *loc. Cit.*, h.35

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Fiqih Siyasah dan Sistem Pemerintahan dalam Islam

Kata fiqih yaitu berasal dari *Faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqih adalah “paham yang mendalam.” Iman al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqih tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata “*Faqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya. “berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*), fiqih merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Sedangkan menurut istilah, fiqih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.¹⁶

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqih disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqih bersifat *ijtihadiyah*, *ijtihadiyah* merupakan upaya sungguh-sungguh dan serius dengan menggenapkan segenap potensi dan kemampuan yang dilakukan seorang ulama atau sekelompok ulama untuk

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, (Padang:Angkasa Raya, 1990), h.591

menggali hakikat hukum dari suatu perkara, melalui sumber-sumber hukum Islam yang utama. Pemahaman terhadap hukum syara' tersebutpun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah), aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawarits* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan), dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).¹⁷

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep fiqh siyasah tersebut.

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*. berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan perbuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.¹⁸

¹⁷ Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1957), h.6

¹⁸ Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), h.108

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “ pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁹” Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah “ membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.²⁰” Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah “ mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.²¹

Dari tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya, Siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.²² Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.²³

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Fiqih Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar’iyyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1997), h.4-5

²⁰ Louis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h.362

²¹ Ibn Manzhur, *Ibid*, h.362

²² Ibnu Qayyim al-Jawziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Islam*. (Kairo: al-Mu’assasah al-Arabiyyah, 1961), h.16

²³ Ahmad Fathi Bahansi, *Al-Siyasah al-Jina’iyah fi al-Syari’at al-Islam*, (Mesir: Maktabah Dar al-Umdah, 1965), h.61

pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya yang ada hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.²⁴

Sistem Pemerintahan Islam dimulai dari zaman al-Khulafa al-Rasyidun sampai pada perkembangan berikutnya, sistem pemerintahan dalam Islama sangat bervariasi. Demikian pula tentang system pengangkatan kepala negara. Pengangkatan Abu Bakar melalui musyawarah tertutup antara Abu Bakar dengan al-Rahman ibn Auf, Utsman ibn Affan serta Asid ibn Khudair dari kelompok Anshar di pihak yang lain.²⁵

Menurut Hasan Ibrahim Hasan, cara ini ditempuh oleh Abu Bakar adalah dalam rangka menjaga keutuhan umat Islam. Abu Bakar sangat khawatir akan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah-Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 4

²⁵ Sulthan Syahril, *Studi Islam tentang Bela Agama dan Negara*, (Bandung : Iris Press, 2008), h.61-62

setelah ia meninggal. Ustman Ibn Affan diangkat melalui pemilihan terbuka oleh “Dewan Formatur” yang terdiri dari enam orang hasil dari penunjukan Umar Ibn Khattab. Penunjukan ini bukan berdasarkan kelompok yang ada tetapi atas dasar pertimbangan kualitas masing-masing pribadi, yaitu karena menurut Nabi mereka ini termasuk calon-calon penghuni surga (*Ahl al-Jannah*). Sedangkan Ali Ibn Abi Thalib diangkat menjadi Khalifah melalui pemilihan dan pertemuan terbuka.²⁶

Menurut Munawir Syadzali, pemilihan tersebut jauh dari kata sempurna, karena setelah para pemberontak berhasil membunuh Ustman, mereka kemudian mendesak Ali Ibn Abi Thalib agar bersedia diangkat menjadi Khalifah. Pada saat pemilihan tersebut dilaksanakan, banyak tokoh senior masyarakat Islam berkunjung ke wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, dan hanya sedikit di antara mereka yang masih tinggal di Madinah. Dari aspek ini dapat dikatakan bahwa peran serta tokoh senior Islam dalam pemilihan Ali Ibn Abi Thalib sebagai Khalifah pada saat itu sangat kecil, yang oleh karenanya keabsahan pengangkatannya pun banyak mendapat tantangan terutama dari Muawiyah Ibn Abi Sufyan dan para pengikutnya.²⁷

Peristiwa terbunuhnya Utsman dan penolakan Muawiyah Ibn Abi Sufyan beserta pengikutnya terhadap keabsahan ke Khalifahan Ali Ibn Abi Thalib, ini merupakan titik awal dan melatarbelakangi perpecahan di kalangan umat Islam yang pada akhirnya menyebabkan Ali terbunuh.

²⁶ Hasan Ibrahim Hasan, *Islamic History and culture, From 632-1968*, terj. Djahdan Human (Yogyakarta : Kota Kembang, 1989), h. 38

²⁷ Munawir Syadzali, *op.cit*, h.27

Peristiwa ini juga banyak mewarnai sejarah ketata negaraan dalam Islam, sebab dengan terbunuhnya Ali Ibn Abi Thalib, maka berakhirilah masa pemerintahan al-Khulafa al-Rasyiddun, dan selanjutnya beralih pada masa Muawiyah Ibn Abi Sufyan.²⁸

Perpindahan kekuasaan kepada Muawiyah sekaligus menyebabkan perubahan sistem pemerintahan di dalam Islam, sebab dengan berakhirnya pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidun yang bercorak demokratis, maka kekhalifahan menjadi semacam *Monarchi Heriditis* (Kerajaan turun temurun atau Kerajaan dinasti). Dan dinasti pertama adalah Bani Umayyah yang dapat bertahan kurang lebih 90 Tahun untuk kemudian digantikan oleh diasti Bani Abbas selama kurang lebih 500 Tahu.²⁹

Sistem pemerintahan dinasti atau *Monarkhi* yang muncul pada pertengahan abad ke-7 dan bertahan lebih dari 1200 Tahun ini, pada abad ke-20 berubah dan mengambil bentuk pemerintahan republik, Konstitusional dan demokratis. Perubahan ini terjadi pertama kali di Turki, yaitu dari bentuk kerajaan menjadi bentuk Negara Republik Turki, kemudian diikuti Republik Indonesia, Republik Pakistan, Republik Mesir, Republik Syiria, Republik Irak, Republik Tunisia, Republik Aljazair, dan lain-lainnya. Sehingga secara umum, sebagian dunia Islam mengambil pemerintahan dalam bentuk Republik, kecuali hanya beberapa negara yang masih tetap bertahan dalam

²⁸ Sulthan Syahril, *Ibid*, h.63

²⁹ Sulthan Syahril, *Ibid*, h.64

bentuk Monarkhi, seperti Saudi Arabia, Maroko, Yordania, Kuwait, dan lain-lain.³⁰

Sistem pemerintahan dalam Islam berkembang mulai dari corak republik-demokratis pada zaman al-Khulafa al-Rasyidun ke corak monarkhi di zaman dinasti-dinasti, dan akhirnya kembali lagi kepada corak republik-demokratis di zaman modern. Perkembangan ini bisa terjadi, seperti yang telah dijelaskan di dalam al-Qur'an yang secara eksplisit tidak mengandung ayat yang menentukan sistem atau bentuk pemerintahan. Dengan kata lain, al-Qur'an tidak menjelaskan secara terperinci sistem politik Islam, kecuali prinsip-prinsip dasar di dalam menjalankan pemerintahan. Di atas prinsip inilah perkembangan sistem itu terjadi dalam sejarah dan perkembangan tersebut sesuai dengan kondisi zaman dan tempat, serta sesuai pula dengan latar belakang yang melingkupi suatu umat.³¹

Akan tetapi tidak berarti sama sekali bahwa kaum muslimin diperkenankan membangun suatu pemerintahan berdasarkan kemauan manusiawi, yang terlepas dari pokok-pokok ajaran Islam. Membangun suatu pemerintahan yang terlepas dari fundamental ajaran Islam berarti membangun pemerintahan yang sekularistik, yang kehilangan dimensi spiritual dan menjurus pada kehidupan yang serba material, di mana di dalamnya petunjuk-petunjuk wahyu tidak lebih dari simbol belaka. Ahmad Syafi'i Ma'arif berpendapat bahwa konsep *Syura* (musyawarah) merupakan gagasan politik utama dalam Islam, maka sistem pemerintahan yang demokratis tampaknya

³⁰ Sulthan Syahril, *Ibid*, h.64

³¹ Sulthan Syahril, *Ibid*, h.64

lebih sesuai dan lebih dekat dengan cita-cita politik Islam. Karena sistem pemerintah berdasarkan demokratis sangat logis dan sangat relevan dengan prinsip ajaran Islam, terutama yang menyangkut keharusan untuk mensosialisasikan budaya musyawarah di kalangan umat Islam dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan yang muncul.³² Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam surat al-Syura ayat 38 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.³³

Di samping itu, berdasarkan fakta sejarah dapat pula diketahui bahwa pemerintahan dengan sistem demokrasi telah diterapkan terutama pada masa pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidun, meskipun eksistensi musyawarah pada waktu itu belum dilembagakan dalam sistem politik. Pada sisi lain, pemerintahan yang didasarkan kepada sistem demokrasi akan menghindarkan kemungkinan penyelewengan negara ke arah otoriterisme, despotisme, diktatorisme, dan sistem lain yang membunuh hak-hak politik rakyat. Partisipasi dan keikutsertaan rakyat dihargai sepenuhnya dalam pengelolaan negara, lantaran rakyat adalah pemilik negara yang sesungguhnya. Sementara

³² Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta :LP3ES, 1985), h. 18

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an,) h.326

para pemimpin hanya merupakan pelayan-pelayan rakyat. Prinsip musyawarah dalam negara atau pemerintah demokratis juga mendasarkan bahwa penguasa-penguasa negara dipilih oleh rakyat secara bebas, atas dasar bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan.³⁴

Para pemikir politik Islam Klasik Sunni memiliki pandangan yang konsisten agar sistem pemerintahan Islam mengacu kepada sistem Khilafah, Mereka itu di antaranya adalah Ibn Taimiyah, Muhammad Al-Ghazali, Muhammad Abduh, Hasan al-Banna dan sebagainya. Sedangkan pemikir politik Islam Klasik Syi'ah memiliki konsep kepemimpinan Islam dalam bentuk Imamah. Mereka yang mendukung konsep ini pada umumnya merupakan warga syi'ah yang terdapat di Iran dan Irak. Di antaranya Sa'idi, Muthahhari, Taleqani, Bazarqan, Bani Sadr dan lain sebagainya. Konsep Khilafah dan Imamah sesungguhnya secara substantif memiliki kesamaan, meskipun dalam batas-batas tertentu terdapat perbedaan-perbedaan, seperti yang tergambar dalam pandangan kelompok Sunni, bahwa pada siapa saja pada dasarnya dapat menjadi Khalifah sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Sementara kelompok Syi'ah berpendapat bahwa kepemimpinan tertinggi atas negara dan agama berada di tangan Imam, dan ia harus memiliki garis keturunan Husein putra Ali Ibn Abi Thalib dan Fatimah, cucu nabi Muhammad SAW.³⁵

³⁴ Sulthan Syahril, *Op.Cit.* h.66

³⁵ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.91-92

Orientasi umum dari sistem Pemerintah Islam yang berbentuk Khilafah dan Imamah yang ditawarkan oleh kelompok Sunni dan Syi'ah di atas pada hakekatnya bertujuan untuk menyatukan wilayah kekuasaan politik Islam dan agama, dan secara umum dalam rangka mengangkat martabat dan jati diri umat Islam. Khususnya untuk kepentingan perlindungan umat Islam dari hegemoni dan tirani barat, karena dalam kenyataannya banyak negara Islam yang telah terjangkit penyakit *Westomania*, yang menganggap resep-resep yang ditawarkan barat sebagai jalan keluar untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. dan sebagai implikasinya Islam tidak lagi dianggap sebagai rujukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan internal umat Islam. yang lebih menyedihkan adalah, Negara-negara Islam hanya menjadi bangsa kelas dua atau kelas tiga dari politik dunia. Selain dari itu, dampak buruk yang dialami umat Islam adalah solidaritas menjadi rapuh, sulit bersatu dan egoisme kelompok dan aliran keagamaan menjadi tinggi, sehingga cita-cita untuk mewujudkan kehidupan yang mencerminkan moral Islam semakin jauh dari harapan. Pada tingkat global, kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya hampir dikuasai oleh kaum Kapitalisme barat dengan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.³⁶

2. Pengertian Pemimpin dalam Fiqih Siyasah

Kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu Imam, Khalifah, Amir, Malik dan Sulthan. Imam menurut bahasa berasal dari kata (*Amma-yaummu-imaman*) yang berarti ikutan bagi kaum,

³⁶ Syarifuddin Jurdi, *Ibid*, h. 93

dan berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan yang benar ataupun mereka yang sesat³⁷. Imam juga bisa diartikan sebagai “pemimpin” seperti “ketua” atau yang lainnya. Kata Imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.³⁸

Imam juga berarti orang yang diikuti oleh suatu kaum. Kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa pada kebaikan. Di samping itu, kata-kata imam sering dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu, di dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala Negara atau yang memimpin umat Islam dan imam dalam arti yang mengimami shalat. Pertama, sering digunakan istilah *al-Imamah al-Udhma* atau *al-Imamah al-Kubra*. Kedua, sering disebut *al-Imamah al-Shugra*. biasanya kata-kata imam hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin di dalam bidang agama.³⁹

Selanjutnya yaitu khalifah yang sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. Kata Khalifah juga bisa diartikan sebagai seseorang yang diberi wewenang untuk

³⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999), h. 428.

³⁸ Ali al-Salus, *Imamah dan Khalifah*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), h. 15.

³⁹ A Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 87

bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.⁴⁰

Khalifah di dalam Al-Qur'an lebih menunjukan kepada fungsi manusia secara keseluruhan terhadap seseorang kepala Negara. Kata Khalifah sebagai kepala Negara adalah “pengganti” Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur keduniawian. Dia tidak maksum, tidak mendapat wahyu, tidak memonopoli hak dalam menafsirkan agama. dia adalah manusia biasa yang dipercaya ummat karena baik di dalam menjalankan agamanya, bersifat adil seperti yang tampak dalam pribadi Abu Bakar dan Khulafa al-Rasyidin. Mereka secara bahasa tidak disebut dengan *Khalifatullah*, tapi *Khalifatu Rasulillah*. Karena yang diganti itu yang meninggal dunia, padahal Allah tetap hidup. Oleh karena itu pula, ketika Abu Bakar dipanggil dengan “wahai *Khalifatullah*” beliau menjawab “saya bukan *Khalifatullah* tetapi *Khalifatu Rasulillah*”.⁴¹

Secara bahasa *Amir* berasal dari kata (*Amara-ya'muru-amran*) yang artinya menyuruh, lawan kata dari melarang, dan dari kata yang berarti bermusyawarah. Sedangkan Secara istilah berarti orang yang memerintah dan dapat diajak musyawarah⁴². Kata-kata *Amir* dengan arti pemimpin tidak ditemukan di dalam al-Qur'an, walaupun kata-kata “*amara*” banyak ditemukan di dalam al-Qur'an. Istilah *amir* dengan arti pemimpin hanya populer di kalangan sahabat. Hal ini terbukti pada saat para sahabat

⁴⁰ Taufiqi Rahman, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Qur'an*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 21

⁴¹ A Djazuli, *Ibid*, h. 91

⁴² Louis bin Nakula Dhahir Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Machreq Sarl Publishers, 2000), h. 344

bermusyawarah di Tsaqifah Bani Sa'adah untuk menentukan pengganti nabi dalam hal keduniawian, para sahabat Anshar berkata “dari kami ada *Amir* dan dari tuan-tuan juga ada *Amir*”. Selain itu, istilah amir juga pernah digunakan oleh Umar bin Khattab ketika menjadi Khalifah menggantikan Abu Bakar.⁴³

Istilah selanjutnya yang menunjukan kepada pemimpin adalah *malik*. *Malik* secara bahasa berasal dari kata, “*Malaka-yamliku-milkan*” yang berarti memiliki atau mempunyai sesuatu. Atau dapat pula berarti pemilik perintah dan kekuasaan pada suatu bangsa, suku atau Negara.⁴⁴

Sulthan secara bahasa berarti *Malik* (Raja) atau wali. Perhatikan Rasulullah menginginkan makna penguasa itu kepada penguasa muslim. Di seluruh dunia bahwa kata *sulthan* itu bersinonim dengan raja. Raja bersinonim dengan *sulthan*, kepala Negara dan *malik*. Di Indonesia kata *sulthan* lebih banyak dikenal daripada *Khalifah*, *imam*, *malik* atau *amir*. Kata *sulthan* diserap dalam bahasa Indonesia dengan konsep makna yang sama yaitu Raja atau Kepala Pemerintahan Muslim.⁴⁵

3. Hukum Mengangkat Pemimpin dalam Fiqih Siyasa

Dalam setiap pemilihan seorang Khalifah, masih banyak umat Islam yang menyia-nyiakan suaranya, sehingga tidak sedikit calon pemimpin Islam yang kalah dalam pertarungan. Padahal mengangkat pemimpin dalam Islam diperintahkan, baik dalam al-Qur'an ataupun hadist. Dalam Q.S An-Nisa ayat 59 disebutkan bahwa orang-orang mukmin diperintahkan patuh Kepada

⁴³ A Djazuli, *Op.Cit*, h. 91

⁴⁴ Mahmud Yunus, *Log.Cit*, h.428

⁴⁵ A Djazuli, *Op.Cit*, h.93

Allah, Rasul dan penguasa mereka. Perintah patuh ini wajib dilaksanakan maka wajib pula memilih pemimpin.⁴⁶

Menurut Muhammad Dhiya al-Din al-Rais, mengangkat kepala negara itu sangat penting, utamanya untuk melanjutkan misi Islam sepeninggalan Nabi Muhammad Saw, melindungi masyarakat dari mudarat, untuk merealisasi kewajiban-kewajiban agama yang pelaksanaannya memerlukan campur tangan penguasa, dan untuk mewujudkan keadilan dan menjamin tercapainya keinginan rakyat untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Karena memandang sedemikian urgennya eksistensi seorang kepala negara sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan, “60 Tahun di bawah pemerintahan (kepala negara) yang zalim, lebih baik dari pada satu malam tanpa kepala negara.”⁴⁷

Tentang wajibnya mengangkat kepala Negara dari masa kemasa Sepakat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya wajib. Al-Iman Al-Bagdadi berkata : “sesungguhnya mengangkat imam (pemimpin) adalah suatu fardhu yang wajib”. Al-Imam Al-Mawardi berkata : “kepemimpinan dibuat untuk menggantikan Nabi dalam menjaga agama dan mengatur dunia”. Al-Imam Ibn Hazm berkata : “telah sepakat seluruh ulama Sunni, Syi’ah dan Muri’ah, mayoritas pengikut Mu’tazilah dan Khawarij, kecuali sakte Najdat, mengangkat pemimpin itu wajib hukumnya. Karena itu, akan berdosa bila

⁴⁶ Mujaar Ibn Syarif, *Khamami Zada, Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 106

⁴⁷ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah Syar’iyah fi Ishlah al-Ra’iyyah*. (Bandung: Angkasa, 2003) h.13

meninggalkannya. Ibnu Kaldun berkata : “sesungguhnya mengangkat pemimpin adalah wajib yang diketahui dalam syara’ dengan ijma’ sahabat dan tabi’in”⁴⁸. Allah SWT berfirman : Q.S An-Nisa :144, Al-Maidah : 51 dan 57.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ
أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿٥٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)”. (Surah An-Nisaa’ Ayat 144)⁴⁹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.(Surah Al-Maidah Ayat 51) ⁵⁰

Sedangkan menurut Al-Ghazali, mengikuti Imam adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Tunduk dan patuh kepada seorang imam termasuk dalam kategori Taat kepada Rasul dan kepada Allah SWT, sepanjang imam menjalankan ajaran syariat Islam, Maka wajib ditaati segala

⁴⁸ Mujaar Ibn Syarif, *Ibid*, h. 107

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an,) h.978

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an,) h.526

perintahnya sekalipun ia hina dalam kaca mata manusia. Dalam artian berani melakukan sesuatu yang tidak populer asal yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang telah digariskan Allah SWT dan Rasulnya, bahkan Rasulullah menggambarkan seandainya seorang hamba Habsyi (yang hitam kelam lagi jelek wajahnya) menjadi pemimpin wajib pula ditaati.⁵¹

Al-Qurtubhi yang merupakan ulama Suni berpendapat bahwa mengangkat Pemimpin merupakan perintah yang harus didengar dan ditaati, agar persatuan dapat terwujud karenanya dan hukum-hukumnya dapat terlaksana.⁵² Selain dalil ini yang menjadi dalil Al-Qurthubi adalah perbuatan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka sepakat mengangkat Abu Bakar Shiddiq setelah terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar di Saqifah Bani Sa'idah tentang penentuan siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah SAW. Ketika itu kaum Ashar berkata, “dari kami *amir* dan dari kalian *amir*.”⁵³

Keinginan kalangan Ashar ini ditolak oleh Abu Bakar, Umar dan kalangan Muhajirin. Kalangan Muhajirin berkata, “Sesungguhnya bangsa Arab tidak akan beragama kecuali karena sekelompok orang dari kaum Quraisy ini”. Mereka juga menceritakan kepada kalangan Anshar tentang keberhakan orang Quraisy sebagai pemimpin. Akhirnya kalangan Anshar menerima dan taat kepada kaum Quraisy dari kalangan Muhajirin tersebut.

⁵¹ Ridhwan Muhammad, *20 Prinsip Islam: Komentar Terhadap Imam Hasan Al-Banna*, terjemahan Ahmad Mudjab Mahali dari kitab *al-Aqaid Syariah Ushul li al-Isyirin li al-Syaba*, (Solo: Ramadhani, 1992), h.78

⁵² Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terjemahan Fathurrahman dkk, dari *al-Jami li Ahkam al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 588

⁵³ Al-Qurthubi, *Ibid*, h. 589

Seandainya pengangkatan pemimpin itu tidak wajib, tidak pada kaum Quraisy dan tidak pula pada selain mereka, tentu tidak akan ada artinya dialog dan perdebatan tersebut. Tentu saat itu ada di antara mereka yang berkata “pengangkatan imam itu tidak wajib, tidak pada orang Quraisy dan tidak pula pada selain mereka. Perdebatan kalian ini tidak berguna, sebab ini adalah perdebatan mengenai perkara yang tidak wajib”.⁵⁴

Kaum Sunni sepakat bahwa mengangkat pemimpin itu adalah wajib hukumnya berdasarkan syariat. Untuk melegitimasi pandangan tersebut kaum Sunni mengemukakan argumennya berdasarkan hadist nabi yang berbunyi “Tidak boleh tiga orang berada di suatu tempat di muka bumi ini, kecuali bila mereka memilih seseorang diantaranya sebagai pemimpin”(H.R Ahmad).⁵⁵

Dasar pembentukan imamah menurut al-Mawardi adalah wajib secara ijma. akan tetapi, dasar kewajiban itu diperselisihkan, apakah berdasarkan rasio atau hukum agama (syari'ah). Menurutny ada dua golongan, *Pertama*, wajib karena pertimbangan akal (rasio). Alasannya manusia itu adalah mahluk sosial, dan dalam pergaulan antara mereka mungkin terjadi permusuhan, perselisihan, dan penganiayaan. Karenanya diperlukan pemimpin yang dapat mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi secara logika manusia membutuhkan pemerintahan. *Golongan dua*, wajib berdasarkan hukum agama (syari'ah) bukan karena pertimbangan akal, karena kepala negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio

⁵⁴ Al-Qurthubi, *Ibid*, h. 590

⁵⁵ Ibn Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hambal*, jilid 2, (Kairo: Dar al-Fikr, t.th), h.177

tidak mendukungnya dan dari rasio itu tidak mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankannya. Sementara itu, rasio hanya mewajibkan setiap orang yang berakal agar tidak melakukan kezaliman dan tidak memutuskan hubungan dengan orang lain, serta mendorong untuk berbuat adil dan menyambung hubungan dengan orang lain.⁵⁶

4. Syarat-Syarat Pemimpin berdasarkan Fiqih Siyasah

Al-Mawardi mengemukakan persyaratan menjadi pemimpin harus memenuhi tujuh syarat yaitu:⁵⁷

- a. Adil berikut syarat-syaratnya yang menyeluruh
- b. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum.
- c. Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani segala persoalan yang diketahuinya.
- d. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
- e. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.
- f. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh.
- g. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan *ijma*.

Sedangkan menurut Al-Farabi kepala Negara haruslah seorang pemimpin yang arif dan bijaksana, yang memiliki dua belas kualitas luhur yang sebagian telah ada pada pemimpin itu sewaktu lahir sebagai watak yang alami atau tabiat yang fitri, tetapi sebagian yang lain masih perlu di tumbuhkan melalui pengajaran yang terarah, pendidikan serta latihan yang

⁵⁶ Hashbi ash-Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara menurut Syariat Islam*, Cet, 1, (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), h.64

⁵⁷ Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-diniyyah*, terjemahan Khalifurrahman Fath & Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h.5

menyeluruh, dengan disiplin yang ketat. Adapun dua belas kualitas luhur itu adalah :⁵⁸

- a. Lengkap anggota badannya
- b. Baik daya pemahamannya
- c. Tinggi intelektualitasnya
- d. Pandai mengemukakan pendapatnya dan mudah dimengerti uraiannya
- e. Pencinta pendidikan dan gemar mengajar.
- f. Tidak rakus dalam hal makanan, minuman dan wanita.
- g. Pencinta kejujuran dan pembenci kebohongan.
- h. Berjiwa besar dan berbudi luhur.
- i. Tidak memandang penting kekayaan dan kesenang-senangan duniawi yang lain.
- j. Pencinta keadilan dan pembenci perbuatan zalim.
- k. Tanggap dan tidak sukar diajak menegakan keadilan dan sebaliknya sulit untuk melakukan atau menyetujui tindakan keji dan kotor dan
- l. Kuat pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, tinggi antusiasme, bukan penakut, dan tidak berjiwa lemah atau kerdil.

5. Ciri-Ciri Pemimpin menurut Fiqih Siyasah

Kepemimpinan adalah “suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan syariat Islam dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama.”⁵⁹

Adapun ciri-ciri Pemimpin menurut Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadist adalah sebagai berikut :

- a. Taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah SWT berfirman : QS.Ali Imran: Ayat 32

⁵⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), h. 56

⁵⁹ Veitzal, Et.al, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.29

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".⁶⁰

Ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan yang bersifat mutlak tanpa ada batasan. Ketaatan harus diberikan kepada pemimpin, selama dirinya taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. jika pemimpin tidak lagi mentaati Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan bagi dirinya. Al-Qur'an telah memberikan yang sangat jelas dan tegas dalam memberikan ketaatan.

b. Beriman dan beramal shaleh, Allah SWT berfirman : QS. Al-Bayyinah :

Ayat 7

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah Sebaik-baik makhluk".⁶¹

c. Mempunyai ilmu (pengetahuan)

Kekuatan dasar seorang pemimpin salah satunya adalah pengetahuan yang luas, tidak mungkin suatu organisasi dipimpin oleh seorang pemimpin yang dangkal pengetahuan, sebab pemimpin harus mempunyai pengetahuan yang lebih luas dari bawahannya.

d. Berpegang pada hukum Allah SWT (Al-Qur'an dan hadis)

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an, 197), h. 128

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Ibid*, h. 1085

Berpegang teguh pada Allah SWT merupakan salah satu kewajiban utama bagi seorang pemimpin, sehingga seorang pemimpin dapat jalan kebenaran yang akan membawa kehidupan yang damai, tentram, sejahtera dan bahagia dunia akhirat.

- e. Menjalankan amanah, Allah SWT berfirman : QS. Al-Anfal : Ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.⁶²

- f. Memutuskan perkara dengan adil, Allah SWT berfirman: QS. An nahl :

Ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ الْقُرْوَينَهُ عَنِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁶³

- g. Mencintai bawahan

Untuk menjadi seorang pemimpin yang dicintai gunakanlah hati dalam berinteraksi dengan bawahan. Berikan sentuhan-sentuhan pendekatan kemanusiaan dalam berkomitmen. Setiap menugaskan suatu

⁶² Departemen Agama Republik Indonesia, *Ibid*, h.264

⁶³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Ibid*, h.415

pekerjaan, sentuhlah kesadarannya terlebih dahulu. Berikan pemaknaan pada hatinya dengan menjelaskan tujuan akhir apa yang sesungguhnya harus dicapai. Bentuk ini nampaknya mulai ditinggalkan oleh sebagian pemimpin.

h. Lemah lembut dan bersikap tegas

Tidak ada seorang pun yang memungkiri bahwa sikap lembut dan bijak adalah sikap yang terpuji, bahkan harus dikedepankan diberbagai situasi dan kondisi, apalagi dalam *beramal ma'ruf nahi dan munkar*.

6. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin dalam Fiqih Siyasah

1. Dipilih oleh *Ahlul Halli wal Aqdi*

Tentang pemilihan kepala Negara oleh kalangan *ahlul halli wal aqdi*, telah diperdebatkan oleh ulama dari berbagai mazhab tentang berapa jumlah dewan pemilihan yang dapat mengesahkan pengangkatan kepala Negara. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pengangkatan itu hanya sah dengan keikutsertaan seluruh *ahlul halli wal aqdi* dari seluruh negeri tanpa membatasi dengan jumlah tertentu.⁶⁴

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang harus hadir untuk mengesahkan pengangkatan khalifah adalah seluruh *ahlul halli wal aqdi*. Hal ini agar selurusnya ridho atas pengangkatan tersebut dan seluruhnya menerima kepemimpinan tersebut. Ulama Syafiyah berpendapat bahwa pengesahan pengangkatan khalifah tidak disyaratkan

⁶⁴ Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Raddu al-Mukhtar Ala al-Durri al-Mukhtar*, (Mesir : Musthafa Al-Halabi, 1966) h. 369

dihadiri oleh seluruh anggota *Ahlul halli wal aqdi* dari seluruh Negara, akan tetapi mengenai jumlahnya masih terjadi perdebatan.⁶⁵

Sebagian ulama berpendapat bahwa jumlah minimal yang dapat mengesahkan pengangkatan khalifah adalah lima orang yang bersepakat untuk mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu atau satu orang mencalonkan seseorang dan kemudian disetujui oleh empat orang lainnya. Pendapat mereka itu didasarkan oleh dua hal. Pertama, Baiat Abu bakar dilakukan oleh lima orang yang sepakat untuk mengangkatnya dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Mereka adalah Umar Ibnu Khathab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Asid bin Hudhrait, Basyar bin Sa'ad, dan Salim Maula Abi Huzaiifah r.a. Kedua, Umar r.a menjadikan syura, yang terdiri atas enam orang sahabat agar satu orang dari mereka diangkat sebagai menjadi pemimpin Negara dengan persetujuan lima orang sisanya. Ini adalah pendapat mayoritas *fuqaha* dan *mutakallimin* dari penduduk Bashrah.⁶⁶

Adapun kelompok yang lain, dari ulama Kuffah, berpendapat bahwa pengangkatan itu dapat dilakukan oleh tiga orang, yaitu satu orang memangku jabatan dengan persetujuan dua orang sehingga satu orang menjadi pejabat dan dua orang menjadi saksi. Seperti sahnya akad pernikahan dengan satu wali nikah dan dua orang saksi. Kelompok yang lain berpendapat bahwa dapat dilakukan dengan satu orang karena Abbas berkata kepada Ali r.a., "Bentangkanlah tanganmu untuk aku baiat kamu."

⁶⁵ Abu Yala al-Farra, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Fikr, 1994), h. 7

⁶⁶ Al-Mawardi, *Op.Cit*, h. 6

Maka orang-orang berkata, “Paman Rasulullah SAW telah membaiaat anak pamannya maka tidak ada orang yang menentangnya karena hal itu adalah hukum satu orang dapat sah.”⁶⁷

2. Penyerahan Mandat dari Kepala Negara Sebelumnya

Menurut Al-Mawardi pengangkatan kepala Negara berdasarkan penyerahan mandat dari kepala Negara sebelumnya boleh dilakukan dan telah disepakati legalitasnya. Hal ini berdasarkan dua peristiwa yang pernah dilakukan kaum muslimin, dan mereka tidak memungkirinya. Pertama, Abu Bakar menunjuk Umar Bin Khatab sebagai khalifah penggantinya, kemudian kaum muslimin menerima kepemimpinan Umar bin Khatab berdasarkan penunjukan penunjukan Abu Bakar tersebut. Kedua, Umar bin Khatab mengamanatkan kepemimpinan sepeninggalnya kepada lembaga Syura. Anggota lembaga Syura yang keseluruhannya adalah tokoh-tokoh periode ketika itu menerima amanat kepemimpinan ini karena meyakini keabsahannya. Sebagian sahabat tidak menyetujui. Ali bin Abi Thallib berkata kepada Abbas bin Abdul Muthalib yang mengecamnya atas keterlibatannya dalam lembaga syura, “ini adalah salah satu dari sekian banyak persoalan Islam yang agung.”⁶⁸

3. Persetujuan Umat

Imam Ahmad dalam menafsirkan hadits “barang siapa mati dalam keadaan ia tidak memiliki pemimpin maka ia mati dengan kematian jahiliyah” mengatakan, “tahukah kamu apa itu pemimpin? Dia adalah yang

⁶⁷ Al-Mawardi, *Ibid*, h. 7

⁶⁸ Al-Mawardi, *Ibid*, h. 10.

kaum muslimin menyetujuinya dan semuanya berkata, ‘ini adalah pemimpin’ ini adalah makna dan pengertian yang dimaksud”.

Ibn Taimiyah, menyangkut pembaiatan Abu Bakar mengatakan bahwa seandainya waktu itu Umar bin Khatab dan sekelompok orang membaiat Abu Bakar namun para sahabat yang lain tidak bersedia membaiat Abu Bakar tidak akan bisa menjadi imam karenanya. Akan tetapi, waktu itu Abu Bakar bisa menjadi imam berdasarkan pembaiatan Jumhur sahabat yang mana mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan, kekuasaan dan pengaruh.⁶⁹

B. Hasil Penelitian Terdahulu atau Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk menghindarkan terjadinya plagiat dalam penelitian skripsi ini, maka akan ditampilkan hasil penelitian terdahulu berupa skripsi sebagai berikut :

1. Skripsi yang di tulis adalah berjudul Penyelenggaraan Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Perspektif Fiqih Siyasah yang dibuat pada Tahun 2018 oleh Vera Agus Indriani dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah Penyelenggaraan Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh Komisi

⁶⁹ Al-Mawardi, *Ibid*, h. 11

Umum. Dari permasalahan peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut⁷⁰ :

- a. Sejak era reformasi bergulir maka penanggung jawab penyelenggaraan pemilu adalah KPU. Untuk pertama kalinya penyelenggaraan pemilu di Indonesia diatur dalam undang-undang No.22 tahun 2007 yang telah digantikan menjadi undang-undang No.15 tahun 2011.yang dimana KPU sebagai lembaga penyelenggara menurut pasal 2 UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi, dan efektivitas.
- b. Pandangan fiqh siyasah terhadap penyelenggaraan pemilihan umum oleh KPU di Indonesia terdapat nilai-nilai Islam, hal ini bisa dilihat dari konsep musyawarah, persamaan dan keadilan yang telah berjalan dengan semestinya, namun di dalam praktiknya masih terdapat tidak kesesuaian.

2. Mawardi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul penelitian "*Presidential threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk penguat system Presidensial". Dalam penelitian ini peneliti sebelumnya fokus

⁷⁰Vera Agus Indriani, "Penyelenggaraan Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah" Skripsi disampaikan di Sidang Ujian Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung.

terhadap syarat pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan *Presidential threshold*, walaupun sama-sama membahas mengenai persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi terdapat perbedaan substansi yang dibahas. Penulis melakukan penelitian mengenai Analisis Fiqih Siyasah terhadap syarat calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018. Oleh karena itu terdapat perbedaan yang prinsip terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti.⁷¹

3. Riska Indriani Mawaruddani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul Analisis Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dalam penelitian ini penelitian sebelumnya fokus terhadap lahirnya serta Implikasi dari Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Walaupun sama-sama membahas mengenai Persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi terdapat perbedaan yang di bahas. Penulis membahas tentang analisis Fiqih Siyasah terhadap persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden pada peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018. Oleh karena itu terdapat

⁷¹ Mawardi, "Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk penguat system Presidensial", "Makalah disampaikan pada seminar ujian sarjana Fakultas Hukum Univeristas Islam Indonesia"

perbedaan yang prinsip terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti.⁷²

Berdasarkan uraian diatas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang telah diteliti sebelumnya, namun tetap berbeda dengan penulis lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang penulis lakukan ini benar-benar asli.



⁷²Riska Indri Maruddani, Analisis Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Skripsi yang di gunakan pada seminar ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Indonesia merupakan negara yang menganut Sistem Pemerintahan Presidensial, di mana Presiden yang menjalankan Pemerintahan dalam arti yang sebenarnya, dan dalam menjalankan kekuasaannya Presiden dibantu oleh para Menteri yang membantu presiden tersebut. Dalam sistem pemerintahan ini juga Presiden menjadi kepala Negara dan merangkap sebagai kepala Pemerintahan. Pemilihan umum merupakan salah satu ciri utama dari negara demokrasi modern dan cara yang demokratis untuk membentuk dan mentransfer kekuasaan dari rakyat kepada otoritas negara.⁷³

Pemilihan Umum di Indonesia adalah sebuah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai hal itu maka pemilihan umum perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan umum ini harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi.⁷⁴

⁷³Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilu* (Yogyakarta, Rangkang, Education, 2014), h. 79

⁷⁴Topo Santoso, Didik Supriyanto. *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi, Ed. I, Cet. I* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.53

Menurut Harris G. Warren Pemilihan Umum adalah kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu warga Negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Menurut A.Sudiharto, Pemilihan Umum adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara.⁷⁵

Menurut Paimin Napitupulu, pemilu adalah rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pimpinan negara atau pimpinan pemerintahan. Hal ini berarti pemerintah itu berarti dipilih oleh rakyat. Semua rakyat mempunyai hak untuk melakukan pemilihan dan sebagian rakyat untuk menjadi pemimpin mereka, ini semua karena proses pemilu. Dengan demikian pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasi aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintah.⁷⁶

Menurut Sigit Pamungkas pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta pemilu dapat berupa perseorangan dan parpol tetapi yang paling utama adalah

⁷⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Grasindo, 1992), h. 15

⁷⁶Yoyoh Rohaniah dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik*,(Malang: Intrans Publishing, 2015), h.439

partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat.⁷⁷

Sedangkan Menurut Betham, Pemilihan Umum merupakan persyaratan minimum Negara demokrasi. Suatu sistem demokrasi dapat dikatakan sudah berjalan ketika terpenuhi beberapa karakteristik, seperti pemilihan umum yang *fair* dan periodik, pertanggung jawaban Negara di depan rakyat, dan adanya jaminan kebebasan berekspresi dan berorganisasi.⁷⁸

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara untuk menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan di mana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapatkan pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.

2. Dasar Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Republik Indonesia menganut suatu sistem dimana kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, hal tersebut pula terdapat di dalam Dasar Negara

⁷⁷ Yoyoh Rohaniah dan Efriza, *Ibid*, h.441

⁷⁸ Anwar Arifin, *Politik Pencitraan Pencitraan Politik*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014),

Indonesia yaitu Undang-Undang dasar 1945. Untuk menjamin pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta terwujudnya demokrasi yang sehat, partisipatif, dan bertanggung jawab perlu adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut.

Adapun dasar hukum dari pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 6A yang berbunyi :
 - 1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
 - 2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
 - 3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
 - 4) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak lah yang dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
 - 5) Tata cara pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang.

Bedasarkan ketentuan pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia pertama kali dilakukan secara langsung oleh rakyat sebelum diadakannya amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 6 ayat (2) pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). telah kita ketahui bahwa undang-undang dasar merupakan pilar dalam negara kesatuan republik Indonesia jadi semua aspek dalam bernegara mempunyai dasar awal dari Undang-Undang Dasar 1945.⁷⁹

- b. Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 22E pasal 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Sedangkan pasal 2 berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Dalam pasal ini sudah jelas bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung setiap lima tahun sekali.

- c. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 perbaharui dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

⁷⁹ Marshall Geh Lak, *Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kutai Kartanegara*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.4 No. 4 (Pebuari 2016), h.1423

Sebagai mana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengeluarkan pendapat merupakan suatu hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, kemudian partai politik sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan demokrasi perlu diatur dalam mewujudkan sistem politik untuk mendukung sistem presidensial yang efektif. Undang-Undang ini juga merupakan salah satu dasar hukum pemilihan umum presiden dan wakil presiden karena partai politik memberikan kontribusi yang besar bagi sistem perpolitikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui hanya partai politik yang berhak mengajukan calon dalam pemilihan umum, begitu juga calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih partai politik agar dapat mencalonkan dirinya.

d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diganti dengan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum⁸⁰.

1) Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.
- 3) Bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 4) Bahwa Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu Undang-undang sebagai landasan hukum pemilihan umum secara serentak.

3. Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan diselenggarakannya pemilihan umum adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan yang pro rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat sehingga terwujudnya cita-cita negara. karena

pemilihan umum (*general election*) juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak-hak asasi warga negara yang sangat prinsipal. Selanjutnya menurut Jimly Asshidiqie, tujuan penyelenggaraan pemilu ada 4 (empat) yaitu :⁸¹

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
- d. Untuk melaksanakan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga Negara.

Dari pendapat lainnya, adapun tujuan diadakannya pemilihan umum sebagaimana berikut ini : ⁸²

- a. Memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di lembaga permusyawaratan atau perwakilan.
- b. Memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahankan tegak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- c. Memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahankan dasar filsafah Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.
- d. Memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD, DPRD, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Kemampuan seseorang ada batasnya, karena itu adalah suatu hal yang sangat wajar kalau selalu terjadi pergantian pemerintahan. Pergantian

⁸¹ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), h.418-419

⁸² Pengertian Pemilu, Tujuan, Fungsi, Syarat” (On-line), tersedia di: <http://www.informasiahli.com/2015/08/Pengertian-Pemilihan-Umum-Tujuan-Fungsi-Syarat.html> di akses hari Senin, Tanggal 18 Maret 2019, Pukul 20:45 wib

pemerintahan di negara-negara yang totaliter berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara demokrasi. Di negara totaliter pergantian pemerintah itu ditentukan oleh sekelompok orang saja. berbeda halnya dalam negara yang berdemokrasi pergantian pemerintahan itu ditentukan oleh rakyat dengan cara mengadakan pemilihan umum.⁸³

Karena itu pemilihan umum disebutkan bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan. Kata memungkinkan di sini tidak berarti bahwa setiap kali dilaksanakan pemilihan umum harus ada pergantian pemerintahan, sebab mungkin saja terjadi suatu partai politik dalam sistem pemerintahan parlementer pemerintahan untuk dua, tiga atau empat kali, atau seorang menjadi Presiden di Amerika Serikat untuk dua kali masa jabatan. Yang dimaksudkan dengan kata memungkinkan di sini adalah bahwa pemilihan umum itu harus membuka kesempatan sama untuk menang bagi setiap peserta. pemilihan umum yang demikian itu hanya mungkin terjadi apabila dilaksanakan dengan jujur.

Sejak lahir ke dunia seseorang telah memiliki hak. Sebagai warga negara maka salah satu haknya dalam bidang politik yang terpenting adalah hak untuk memilih siapakah wakilnya itulah yang akan menjalankan kedaulatan yang dipunyainya. Dan disamping itu terbuka pula baginya kesempatan untuk duduk dalam badan perwakilan rakyat sebagai wakil yang dipercayakan oleh para pemilihnya untuk menjalankan kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat.

⁸³ Pemilihan Umum di Indonesia” (On-line), tersedia di : <http://randyrinaldi.blogspot.co.id/2014/03/pemilihan-umum-di-Indonesia.html> di akses hari senin, pada 18 maret 2019.pukul 21:15 wib

Karena itu tidak berlebihan kalau dikatakan, apabila suatu pemerintahan telah memutuskan untuk tidak melaksanakan pemilihan umum, maka orang akan mengatakan demokrasi di negara itu telah mulai sirna. Dari tujuan di atas dapat dikatakan bahwa pemilihan umum tidak saja penting untuk warga negara, partai politik, tapi pemerintahan itu sendiri. bagi pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilihan umum yang jujur berarti bahwa pemerintahan itu mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat. Sebaliknya kalau pemerintahan yang dibentuk dari hasil pemilihan yang tidak atau kurang jujur maka dukungan rakyat itu hanya bersifat semu. Dilihat pula dari sudut pemilihan umum, maka tujuan diadakannya pemilihan umum itu baru dapat tercapai apabila pelaksanaan pemilihan umum benar-benar jujur, sehingga setiap warga negara yang berhak memilih memberikan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya.

4. Asas-Asas dalam Pemilihan Umum

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menegaskan pemilihan dilaksanakan secara demokrasi berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁸⁴

a. Asas Langsung

Asas langsung yaitu rakyat dapat memilih langsung calon pemimpin yang sesuai dengan pikiran dan hati tanpa bisa diwakili siapapun. Bagi seseorang yang menderita sakit dapat langsung

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 2

memberikan suaranya dikediamannya dengan pengawasan dari pihak agar kertas yang telah menjadi hak pilihannya tidak disalahgunakan.⁸⁵

b. Asas Umum

Asas umum yaitu yang berlaku bagi siapa saja tidak memandang jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial seseorang, pemilu adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat misalnya telah berusia 17 tahun atau telah menikah serta sehat jasmani dan rohani (tidak gila).⁸⁶

c. Asas Bebas

Asas bebas yaitu dalam memberikan suaranya, pemilih tidak ada tekanan dari pihak manapun yang memungkinkan dia memberikan suara tidak sesuai dengan hati nuraninya, dia benar-benar bebas untuk menentukan pilihannya.⁸⁷

d. Asas Rahasia

Rahasia maksudnya adalah tiap warga atau pemilih dijamin oleh peraturan, tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun, siapapun dan siapa yang dipilihnya. Tujuan dari kerahasiaan ini adalah untuk menjamin keamanan dari pemilih sehingga pemilih dapat bebas dan aman dalam menentukan pilihannya.⁸⁸

⁸⁵ C.S.T. Kansil, *Memahami Pemilihan Umum dan Refereendum*, (Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 1986), h.7

⁸⁶ C.S.T. Kansil, *Ibid*, h. 26

⁸⁷ Bintang R Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1989), h.171

⁸⁸ C.S.T. Kansil, *Loc.Cit*, h.26

e. Asas Adil

Asas adil yaitu semua pemilih mendapatkan hak dan perlakuannya yang sama termasuk perlindungan dari adanya ancaman dan kecurangan dari pihak-pihak tertentu. Para pemilih yang berusia manual tidak dibolehkan ditinggalkan begitu saja tanpa pemberitahuan. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi ada beberapa oknum dan orang-orang yang tak bertanggung jawab mengendalikan situasi tertentu yaitu membiarkan para manula terlambat datang dalam pemilu dan akhirnya mereka kehilangan hak pilihnya karena alasan waktu pemilu telah habis.⁸⁹

Perlu diketahui bahwa pemilu memiliki waktu yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara batas waktu akhir memilih. Hal itu untuk mempermudah perhitungan suara secara serentak di semua provinsi di Indonesia dan yang ada diluar negeri.

f. Asas Jujur

Asas jujur yaitu pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan apa adanya tanpa ada perwakilan dan keluarga, teman atau orangtua atau lewat perantara lainnya. Ketika perhitungan suara dilakukan maka dari pihak panitia penyelenggara pemilu harus memperbolehkan masyarakat ikut menyaksikan acara perhitungan suara tersebut. intinya

⁸⁹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.67

adalah perhitungan suara harus secara transparan, melibatkan masyarakat dan secara langsung.⁹⁰

5. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilihan umum berbeda satu sama lain, tergantung dari sudut mana pandangan ditunjukkan kepada rakyat, apakah ia dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihannya, dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat, ataukah rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang sama sekali tidak berhak menentukan siapakah wakilnya yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, atau juga tidak berhak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.⁹¹

Berdasarkan hal tersebut maka sistem pemilihan umum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu Sistem Pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis.

a. Sistem Pemilihan Mekanis

Pandangan sistem pemilihan mekanis menempatkan rakyat sebagai suatu masa individu-individu yang sama. Aliran Liberalisme, Sosialisme dan Komunisme semuanya berdasarkan pandangan mekanis ini. Bedanya bahwa Liberalisme mengutamakan individu sebagai kesatuan otonom dan memandang masyarakat sebagai kompleks hubungan-hubungan antar individu yang bersifat kontraktuil, sedangkan Sosialisme dan khususnya Komunisme mengutamakan totalitet kolektip

⁹⁰ Bintang R Saragih, *Loc.Cit*, h.170

⁹¹ Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Sastra Hudaya,2005), h.332

masyarakat dan mengecilkan peranan individu dalam totalitet kolektip itu. Tetapi semua aliran di atas mengutamakan individu sebagai pengenali hak pilih aktif dan memandang rakyat (korps pemilih) sebagai suatu masa individu-individu yang masing-masing mengeluarkan satu perkara (suara dirinya sendiri) dalam setiap pemilih.⁹²

b. Sistem Pemilihan Organis

Pandangan sistem pemilihan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan : geneologis (rumah tangga atau keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial(buruh, tani dan cendikiawan) dan lembaga-lembaga sosial(Universitas). Masyarakat dipandangnya sebagai suatu organisme yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalite organisme itu, seperti persekutuan-persekutuan hidup itulah yang diutamakannya sebagai pengendali hak pilih, atau dengan perkataan lain sebagai pengendali hak untuk mengutus wakil-wakil kepada perwakilan masyarakat.⁹³

Menurut sistem pemilihan Mekanis, partai-partai politik yang mengorganisir pemilih-pemilih dan memimpin pemilih berdasarkan sistem *Bi Party* atau *Multy Party* (*Liberalisme*, *Sosialisme*) atau *Uni Party* (Komunis). Sedangkan menurut sistem Organis, partai-partai

⁹² Harmaily Ibrahim, *Ibid*, h.333

⁹³ Harmaily Ibrahim, *Ibid*, h.334

politik tidak perlu dikembangkan, karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh tiap-tiap persekutuan hidup dalam lingkungannya sendiri.

Menurut sistem Mekanis, Badan Perwakilan bersifat sebagai Badan Perwakilan kepentingan umum rakyat seluruhnya. Sedangkan menurut sistem Organik, Badan Perwakilan bersifat Badan Perwakilan kepentingan-kepentingan khusus persekutuan hidup itu. Dalam bentuk paling ekstrim sistem yang pertama menghasilkan “parlemen” sedangkan sistem yang kedua menghasilkan “Dewan Korporatif.” Kedua sistem tersebut dapat dikombinasikan khusus dalam negara-negara dengan sistem Bi-Kameral.

Karena dalam sistem mekanis, wakil-wakil yang duduk di Badan Perwakilan Rakyat langsung dipilih, dan dalam sistem organik, wakil-wakil tersebut berdasarkan pengangkatan, maka bagi negara yang menganut dua Badan Perwakilan Rakyat seperti di Indonesia, dimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat, dan di Majelis Permusyawaratan Rakyat terdapat utusan golongan, maka kedua sistem tersebut dapat diterapkan untuk Indonesia saat ini. Bahkan dalam perkembangan ketatanegaraan kemudian, sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat diangkat, dan sebagian besar lainnya dipilih melalui pemilihan umum.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Yakni meliputi pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh Undang-Undang 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.⁹⁴

Untuk menghadapi pelaksanaan pemilu, KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya pemimpin atau wakil rakyat berkualitas. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain sebagai motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredible di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

⁹⁴http://id.m.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum// diakses pada hari Minggu 24 2019 jam 22.10 wib

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu, salah satunya kualitas penyelenggara pemilu, KPU diuntut independen dan non partisipan. Untuk itu DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Undang-Undang ini merupakan pergantian atas atau pengganti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.⁹⁵

Sebelumnya keberadaan penyelenggara pemilihan umum terdapat dalam pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

2. Sejarah Terbentuknya Komisi Pemilihan Umum

Sejarah lembaga penyelenggara di Indonesia dimulai pada 7 November 1953 tentang pengangkatan panitia pemilihan Indonesia (PPI). Panitia inilah yang bertugas untuk menyiapkan, memimpin, dan menyelenggarakan pemilu 1955 guna memilih anggota Dewan Konstituante dan anggota DPR.

Presiden Soekarno melantik pimpinan dan anggota PPI pada Tanggal 28 November 1953. Sejak itu maka lembaga yang bersiat *an hoc*

⁹⁵ UU No. 15 Tahun 2011, *Tentang Penyelenggara Pemilu*

ini mulai menjalankan tugasnya. Pemilu 1955 yang dilaksanakan pada Tanggal 29 september 1955 untuk memilih anggota DPR, dan pada Tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante kemudian dikenal luas sebagai pemilu pertama yang berlangsung damai, adil, dan demokratis.

Penyiapan perangkat legal formal pemilu 1955 membutuhkan waktu bertahun-tahun yang berselang masa beberapa kabinet. Gagasan untuk menggelar pemilu diumumkan kali pertama pada 5 Oktober 1945 oleh pendiri bangsa, namun tidak bisa segera direalisasikan akibat suasana revolusi kemerdekaan yang dimulai dengan Agresi militer Belanda I dan II. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konfrensi Meja Bundar (KMB) pada Tanggal 27 Desember 1949, dan Indonesia menjadi negara Federal Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, setiap kabinet pemerintah di era demokrasi Liberal (Sistem Parlementer) berganti tidak satupun kabinet yang berhasil membentuk Undang-Undang pemilu.

Akhirnya, baru pada kabinet Wilopo, yang disokong koalisi PNI-Masyumi-Sosialis, berhasil dilanjutkan rancangan Undang-Undang (RUU) pemilu yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR pada 4 April 1953. Pasal 17 UU Nomor 7 Tahun 1953. Pasal 17 UU Nomor 7 tahun 1953 menyebutkan, "penyelenggara pemilu terdiri atas panitia pemilihan Indonesia (PPI) yang berkedudukan di ibukota negara, panitia pemilihan

yang berkedudukan di setiap daerah pemilihan, panitia pemilihan kabupaten yang berkedudukan di setiap kecamatan, panitia pemungutan suara yang berkedudukan di setiap desa, dan panitia pemilihan luar negeri.”

Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa PPI ditunjuk oleh Presiden, panitia pemilihan (PP) ditunjuk oleh Menteri Kehakiman ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Ketentuan terakhir ini sempat menimbulkan ketegangan antara pemerintah dengan PPI dalam menyusun kepanitian pemilu secara keseluruhan, karena pasal 18 UU Nomor 7 Tahun 1953 dengan jelas menyatakan bahwa PPI bertugas menyiapkan, memimpin, dan menyelenggarakan pemilu, yang berarti juga membuat peraturan teknis pemilu. namun rapat Dewan Metri pada Mei 1954 memutuskan bahwa PP merupakan satu organisasi dibawah pimpinan PPI. Adapun pegawai pamong praja atau PNS Pemerintah Daerah (Pemda) yang karena jabatannya menjadi ketua badan penyelenggara pemilihan, tugasnya hanya bersifat teknis semata. Demikian pula peran Menteri Kehakiman dan Mendagri dalam pengangkatan kepanitian pemilu sifatnya hanya administratif, karena calon-calon sesungguhnya dipilih dan diajukan oleh PPI.

Dalam memilih calon-calon anggota PP dan PPKA, PPI berusaha mengakomodasi usulan-usulan partai peserta pemilu, hal ini membuat peran PPI sangat sentral, dan karenanya posisi keanggotaan PPI benar-benar direbutkan partai-partai yang berkoalisi dalam kabinet. kabinet Walipo yang berhasil mengesahkan UU pemilu ternyata gagal membentuk PPI

karena tidak tercapai kata sepakat di antara partai-partai koalisi PNI-NU, dan beberapa partai kecil. Koalisi tersebut berhasil membentuk pada awal November 1953. Dalam keputusan presiden Nomor 188 Tahun 1953 tentang pengangkatan PPI tertanggal 7 November 1953, ditetapkan Sembilan anggota PPI. Kemudian melalui keputusan presiden Nomor 175 Tahun 1955, tertanggal 26 Desember 1955, dilakukan penambahan lima anggota PPI dengan masa kerja empat tahun seperti diatur di dalam UU Nomor 7 Tahun 1953.

Pada perkembangan selanjutnya, setelah presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden 5 juli 1959, yang menandai pemberlakuan kembali UUD 1945, Indonesia mulai menandai masa demokrasi terpimpin. Dengan demikian, sistem demokrasi liberal ditinggalkan dan lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUDS 1950, termasuk PPI dengan sendirinya bubar atau dibubarkan.

Pergantian dan penambahan anggota PPI sesungguhnya tidak lepas dari dinamika politik yang berkembang dalam sistem pemerintahan palementer. Seperti disebut sebelumnya, Kabinet Wilopo gagal menyusun PPI. Kegagalan ini merupakan salah satu faktor penting jatuhnya cabinet Wilopo. Selanjutnya kegagalan tersebut dimanfaatkan oleh Kabinet Alisastroamidjojo yang menunjuk semua anggota PPI berasal dari partai koalisi, dan mengabaikan usulan-usulan dari kubu oposisi. Kenyataan inilah yang mengundang kritik keras kubu oposisi yang khawatir sekali akan indenpedensi dan netralitas PPI dalam penyelenggaraan pemilu.

Setelah pergantian kekuasaan dari Orde lama ke Orde baru, pada akhir 1969, Presiden Soeharto menjadwalkan pemilu 1971. Bagai mana posisi, fungsi, struktur dan organisasi penyelenggaraan pemilu orde baru. Pemerintah saat itu menolak kehendak partai untuk terlihat dalam kepanitiaan pemilu. pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 1969 menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan oleh pemerintah dibawah pimpinan Presiden. Untuk melaksanakan pemilu, Presiden membentuk lembaga pemilihan umum (LPU) yang diketahui oleh Mendagri. Adapun tugas LPU meliputi : *pertama*, merencanakan dan menyiapkan pelaksanaan pemilu, *kedua*, memimpin dan mengawasi PPI, Panitia pemilihan daerah I(PPD I), Panitia pemilihan II (PPD II), Panitia pemungutan suara(PPS), dan Panitia pendaftaran pemilih (PPPH), *ketiga*, mengumpulkan dan mensistemkan bahan-bahan dan data-data pemilu, *keempat*, mengerjakan hal-hal yang dipandang perlu untuk melaksanakan pemilu.

PPI yang berkedudukan di Jakarta bertugas menyelenggarakan pemilu DPR, serta merencanakan dan mengawasi penyelenggaraan pemilu untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II . PPD I yang berkedudukan di ibukota provinsi bertugas membantu tugas-tugas PPI, yaitu menyelenggarakan pemilu untuk DPRD I, serta mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan pemilu untuk pemilihan anggota DPRD I, dan anggota DPRD II.PPD II yang berkedudukan di ibukota kecamatan bertugas menyelenggarakan pemungutan suara, serta membantu tugas-tugas PPD II.

PPPH yang berkedudukan di setiap desa bertugas menyelenggarakan pendaftaran pemilih, serta membantu tugas-tugas PPS.

Setelah pemerintah orde baru tumbang dan digantikan pemerintah di era reformasi mulai tahun 1998, model penyelenggaraan pemilu di Indonesia kembali mengalami perubahan format. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor XIV/1998, memerintahkan Presiden B.J Habibie untuk menyelenggarakan pemilu selambat-lambatnya pada 7 Juni 1999. Berkenaan dengan pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu, pemerintah waktu itu benar-benar tidak mau mencampuri bahkan demi menjaga netralitasnya pemerintah menunjuk kalangan akademisi dan profesional untuk mewakili pemerintah dalam keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu.⁹⁶

Pemilu Tahun 1999 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu pengganti Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang dibentuk oleh Presiden. KPU telah menyelenggarakan pemilu Tahun 1971 sampai pemilu 1997. Dasar pembentukan KPU pertama ini adalah Ketetapan MPR RI Nomor XIV/MPR/1998 tentang perubahan dan tambahan atas Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal 1 poin 5 Tap MPR RI No.XIV/MPR 1998 disebutkan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh badan penyelenggara pemilihan umum yang bebas

⁹⁶ Gunawan Suswanto, *Op.Cit*, h.28-29

dan mandiri. Yang terdiri atas unsure-unsur partai-partai politik peserta pemilu dan pemerintah, yang bertanggung jawab kepada presiden.”⁹⁷

Pada saat penyelenggaraan pemilu di Tahun 1999 aturan main diatur dalam UU No.3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum. Dalam pasal 8 ditegaskan bahwa penanggung jawab pemilu adalah Presiden. Meskipun UU No.3 Tahun 1999 telah menyebut bahwa pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bebas dan mandiri, tetapi karena keanggotaan KPU berasal dari unsur politik peserta pemilu dan pemerintah, kemandirian dari lembaga KPU sangat sulit terjadi karena *conflict of interest* di dalamnya unsur keanggotaan KPU bukanlah unsur yang bebas dan mandiri, tetapi peserta pemilu itu sendiri. untuk itu, UU No.12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dikatakan merevisi kedudukan dan kemandirian KPU sebagai Penyelenggara Pemilu.⁹⁸

Pada prinsipnya sifat KPU tetap sebagai diatur dalam UU No.12 Tahun 2003 yaitu, bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hanya saja dalam Undang-Undang baru ini, yaitu UU No.22 Tahun 2007 yang telah di revisi UU No.15 Tahun 2011 dinyatakan dengan kalimat yang berbeda, yakni “wilayah kerja KPU meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun

⁹⁷Muhammad Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Teori, Konsep dan Isus Strategis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.139

⁹⁸Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.245

berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota juga sama seperti sebelumnya yaitu bersifat tetap dan mandiri.⁹⁹

3. Tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum

Komisi pemilihan umum sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu yang di gantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Adapun tugas, wewenang dan kewajiban KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu:¹⁰⁰

Tugas dari Komisi Pemilihan Umum yaitu sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, Kabupaten Kota, PPK, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
- d. Mengordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu.
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi.
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu danawaslu.
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya.
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusanawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu.
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.

⁹⁹Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.19

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 12

- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap penyelenggaraan pemilu.
- l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Komisi Pemilihan Umum yaitu sebagai berikut:

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- b. Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
- c. Menetapkan peserta pemilu.
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Provinsi untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi perhitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara.
- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya.
- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan
- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN.
- i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN.
- j. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jendral KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu.
- l. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Komisi Pemilihan Umum yaitu sebagai berikut :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu.
- b. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara.
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.

- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Mengelolah, memelihara, dan merawat arsip atau dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia.
- f. Mengelolah barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada bawaslu.
- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.
- i. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat.
- j. Melaksanakan putusan bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu.
- k. Menyediakan data hasil pemilu secara nasional.
- l. Melakukan pemuktahiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Melaksanakan putusan DKPP, dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 231 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan peraturan pemilihan umum dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Di dalam peraturan KPU Nomor 22 tahun 2018 mengatur tentang persyaratan-persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil

Presiden, persyaratan-persyaratan tersebut terdapat 20 persyaratan yaitu sebagai berikut :¹⁰¹

1. Syarat untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden

a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah taat menjalankan kewajiban agamanya atau hidup menurut ajaran Tuhan.¹⁰²

b) Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

Maksudnya adalah warga negara yang akan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara yang telah mengalami akulturasi nilai-nilai budaya, adat istiadat dan keaslian bangsa Indonesia, serta memiliki semangat patriotism dan jiwa kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c) Suami/istri calon Presiden dan suami/istri calon Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia.

d) Tidak pernah mengkhianati Negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

Maksudnya adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara, serta tidak pernah

¹⁰¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 09

¹⁰² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 12

melanggar Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- e) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter dan Badan Narkotika Nasional.

Maksudnya dari “Mampu secara rohani dan jasmani” adalah sehat fisik, mental, spiritual dan sosial dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden.

- f) Bertempat tinggal di wilayah Negara kesatuan Negara Republik Indonesia.

Maksudnya adalah calon Presiden dan Wakil Presiden harus bertempat tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia

- g) Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara Negara.

Maksudnya adalah calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum ia di calonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden maka mereka wajib melaporkan semua harta kekayaannya kepada pihak penyelenggara yang berkewenangan memeriksa laporan kekayaan.

- h) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara.

i) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

j) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Maksudnya adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.

k) Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD.

l) Terdaftar sebagai pemilih.

m) Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang di buktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

Maksudnya adalah dalam hal 5 (lima) Tahun terakhir bakal pasangan calon tidak sepenuhnya atau belum memenuhi syarat sebagai wajib pajak, kewajiban pajak terhitung sejak calon menjadi wajib pajak.

n) Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.

Maksudnya adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan itu kurang dari 5 (lima) Tahun.

- o) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Persyaratan Setia kepada pancasila, undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang didasarkan atas rekomendasi dan jaminan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik.

- p) Tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (tahun) atau lebih.

Maksudnya adalah apabila seorang yang ingin mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih misalnya, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana terorisme dan masih banyak lainnya yang diputuskan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terkecuali bagi yang sudah mendapatkan amnesti dan/atau rehabilitasi.

- q) Berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun.
- r) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas(SMA), madrasah aliyah (MA) sekolah menengah kejuruan (SMK) madrasah aliyah kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

Maksud dari “sekolah lain yang sederajat” antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Theologi Kristen, dan Sekolah Seninari. Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- s) Bukan bekas anggota organisasi terlarang partai komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau organisasi terlarang lain menurut Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - t) Memiliki visi, misi dan program dalam melaksanakan pemerintah Negara republik Indonesia.
2. Bagi bakal yang bersetatus sebagai pejabat negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negri Sipil, atau karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, wajib mengundurkan diri.
3. Persyaratan pengunduran diri sebagai pejabat negara yang dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat, pimpinan atau anggota DPR, pimpinan atau anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota.

4. Persyaratan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
5. Disabilitas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.



BAB IV

ANALISIS

Setelah penulis menguraikan setiap bab yang memiliki hubungan dengan judul skripsi penulis, maka penulis akan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal dan lain-lain tentang Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Persyaratan Menjadi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Studi Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 22 Tahun 2018 yang tertera dalam pasal 09 ayat satu (1) tentang syarat-syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.

A. Analisis fiqh siyasah terhadap peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 yang tertera dalam pasal 09 ayat satu (1) tentang syarat-syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 pada pasal 09 ayat satu (1) terhadap persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden terdapat 20 persyaratan, akan tetapi penelitian ini fokus terhadap lima (5) persyaratan saja untuk disesuaikan dalam Hukum Islam, karena penelitian ini untuk pencegahan agar peraturan KPU tetap di bawah literatur Hukum Islam, karena salah satu fungsi hukum Islam menjadi landasan terbentuknya Undang-Undang atau Hukum Positif. Lima persyaratan tersebut yaitu :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah taat menjalankan kewajiban agamanya atau hidup menurut ajaran Tuhan.¹⁰³

2. Tidak pernah mengkhianati Negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

Maksudnya adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara, serta tidak pernah melanggar Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter dan Badan Narkotika Nasional.

Maksudnya dari “Mampu secara rohani dan jasmani” adalah sehat fisik, mental, spiritual dan sosial dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden.

4. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Maksudnya adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 12

5. Memiliki visi, misi dan program dalam melaksanakan pemerintah Negara republik Indonesia.

Syarat-syarat Pemimpin berdasarkan Fiqih Siyasah sebagai berikut:

Al-Mawardi mengemukakan persyaratan menjadi pemimpin harus memenuhi tuju syarat yaitu:¹⁰⁴

- a. Adil berikut syarat-syaratnya yang menyeluruh,

Maksudnya adalah seorang pemimpin harus menghiiasi diri dengan sifat-sifat kemuliaan dan akhlakul karimah, terhindar dari sifat fasik, maksiat, keji dan munkar.

- b. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum.

Maksudnya adalah seorang pemimpin harus mempunyai ilmu pengetahuan untuk memutuskan suatu perkara yang tidak di bahas dalam Al-Qur'an maupun Hadist dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.

- c. Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani segala persoalan yang diketahuinya.

- d. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.

- e. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.

¹⁰⁴ Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-diniyyah* terjemahan Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h.5

- f. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh.
- g. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan *ijma*.

Berdasarkan dari analisis peneliti, bahwasannya di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 pasal 09 ayat satu (1) terhadap persyaratan-persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Hukum Islam adanya keselarasan di dalamnya, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Maksud dari bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ialah, Bahwa Taqwa adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dan taat menjalankan kewajiban agamanya.¹⁰⁵ Adapun dalam hukum Islam juga terdapat bagaimana seorang pemimpin harus Taat kepada Allah dan Rasulnya, yang sebagai mana telah dijelaskan dalam QS. An-Nisaa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۖ

¹⁰⁵ Syarat Menjadi Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD' (On-line), tersedia di: <http://www.google.com/amp/s/gurupkkn.com/syarat-menjadi-presiden-dan-wakil-presiden-menurut-uud/amp> di akses hari minggu, Tanggal 28 April 2019, pukul 23:15 wib

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹⁰⁶

Dalam Surah An-Nisaa Ayat 59 memerintahkan agar kaum muslimin Taat dan patuh kepada-Nya, kepada Rasul-Nya dan pada orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar terciptanya kemaslahatan umum. jika terdapat perbedaan pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak bisa dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunahnya, maka yang demikian itu adalah sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian.¹⁰⁷

2. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Maksud dari Tidak pernah melakukan perbuatan tercela Artinya tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.¹⁰⁸

Adapun dalam Hukum Islam yang sebagaimana dijelaskan oleh al-Ghazali kriteria seorang pemimpin salah satunya harus memiliki sifat

¹⁰⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: yayasan penyelenggaraan penterjemah al-Qur'an,) h.87

¹⁰⁷ Ayat-ayat al-Qur'an tentang kepemimpinan, Syarat-syarat, tugas dan tanggung jawab pemimpin, (On-line), tersedia di : <https://www.sinizam.com/2016/09/ayat-ayat-al-quran-tentang-kepemimpinan-syarat-syarat-tugas-tanggungjawab-pemimpin-khalifah-khilafah.html?m=1> di akses hari senin, Tanggal 08 Juli 2019, pukul 20 :35 wib

¹⁰⁸ *Ibid*, Syarat Menjadi Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD Nomor 7 Tahun 2017.

Wara' yaitu kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela.¹⁰⁹ Dalam Islam pun seorang yang ingin menjadi pemimpin harus memiliki sifat adil maksudnya seorang pemimpin harus menghiasi diri dengan sifat-sifat kemuliaan dan akhlakul karimah, terhindar dari sifat fasik, maksiat, keji dan munkar sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An Nahl : Ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.¹¹⁰

3. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

Maksud dari mampu secara rohani dan jasmani adalah sehat fisik, mental, spiritual dan sosial dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden.¹¹¹

Adapun di dalam hukum Islam juga yang telah di tuliskan oleh Imam al-Mawardi di dalam bukunya yaitu al-Ahkam Suthaniyah Sistem

¹⁰⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta : UI Press, 2003), hl. 78

¹¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: yayasan penyelenggaraan penterjemah al-Qur'an,) h.197

¹¹¹ *Ibid*, Syarat Menjadi Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD Nomor 7 Tahun 2017

Pemerintahan Khilafah Islam, yang di mana al-Mawardi menjelaskan bahwa syarat menjadi pemimpin yaitu salah satunya adalah, memiliki panca indra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya. Serta seorang Pemimpin harus memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya menjalani tugas dengan baik dan cepat.¹¹² H. Sulaiman Rasjid di dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Islam* menjelaskan bahwa Syarat-syarat menjadi seorang Khalifah salah satunya yaitu harus Sejahterah pancaindra dan anggota lainya dari segala yang mengurangi kekuatan berfikir dan kekuatan jasmani atau tenaganya.¹¹³

Al-Farabi dalam bukunya yang berjudul *Al-Siyasah al-Madaniyyah* menjelaskan juga bahwa Syarat-syarat menjadi seorang pemimpin salah satunya yaitu, memiliki anggota badan yang sempurna, sehingga memungkinkan dia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan secara baik. Apabila ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dengan anggota badan dia dapat melakukannya dengan mudah. Badan yang sakit akan mengakibatkan pada rusaknya indra (rasa) dan kepekaan, seperti manis, bagi orang sakit akan terasa pahit, sesuatu yang tepat di mata orang sakit bisa menjadi tidak tepat. Analogi ini bisa di terapkan kepada orang-orang yang buruk (perangainya) dan tidak sempurna. Mereka ini oleh al-Farabi, disebut dengan orang yang sakit jiwanya. bagi

¹¹² Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, terjemahan Khalifurrahman Fath & Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h.11

¹¹³ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2003), h. 500

mereka hal-hal yang baik, di matanya, bisa menjadi buruk. Adapun orang yang utama dan memiliki keutamaan akhlaq akan selalu condong dan selamanya merindukan tujuan-tujuan yang terbaik dalam arti sebenarnya dan bagi orang yang buruk perangainya akan selalu condong dan selalu merindukan keburukan sebagaimana yang dibayangkannya sebagai suatu kebaikan disebabkan jiwanya yang “sakit”. Padahal untuk mencapai kebahagiaan salah satu diantaranya adalah dengan menghilangkan keburukan/kejahatan yang ada di tengah-tengah (masyarakat) kota dan umat.¹¹⁴

4. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

Maksud dari tidak pernah mengkhianati negara yaitu tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar undang-undang dasar negara republik Indonesia.

Adapun di dalam hukum Islam juga sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyyah, pemimpin haruslah memenuhi Syarat-syarat yang salah satunya adalah Amanah, yaitu takut kepada Allah, tidak menjual ayat-ayat Allah tidak takut kepada manusia. Amanah sebagaimana yang dimiliki sifat Nabi Muhammad SAW yaitu bisa dipercaya, yang dimana sifat ini ditanamkan khususnya kepada para

¹¹⁴ Al-Farabi, *al-Siyasah al-Madaniyah*, (Beirut :Dar al-Masyriq, 1993), h. 84

sahabat yang ditugaskan di semua hal apa saja untuk bisa berbuat amanah, tidak curang dalam hal apa saja.¹¹⁵ Menurut H. Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Islam” seorang Khalifah haruslah memenuhi syarat salah satunya yaitu, Kifayah, Artinya bertanggung jawab, teguh, kuat, dan cakap untuk menjalankan pemerintahan, memajukan negara, dan agama, sanggup membela keduanya dari segala ancaman musuh.¹¹⁶ Sebagaimana Allah SWT telah berfirman di dalam Suratnya yaitu, QS. Al-Anfal : Ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.¹¹⁷

Perkataan amanah dalam konteks ke kuasaan negara dapat dipahami suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu ke kuasaan dapat disebut “mandat” yang bersumber dari Allah Swt. Kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah di tetapkan

¹¹⁵ Ibn Taymiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ashlah al-Ra'y wa Ra'iy*, Dar al-Kitab al-Arabi, (Mesir : Darul Kitabul Aroby), h.15-16

¹¹⁶ *Ibid*, H.Sulaiman Rasjid, h. 500

¹¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahanny*, (Jakarta: yayasan penyelenggaraan penterjemah al-Qur'an,) h.71

oleh al-qur'an dan dicontohkan oleh Sunah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.¹¹⁸

5. Memiliki visi, misi dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Maksudnya adalah seorang calon presiden dan wakil presiden harus mempunyai visi, misi dan program untuk membangun Indonesia lebih baik kedepannya.¹¹⁹

Adapun menurut Iman al-Mawardi mensyaratkan sekelompok Imamah (Kepemimpinan) haruslah memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan. Gagasan atau visi pemikiran yang baik dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan umat. Karena kepala Negara adalah pengganti fungsi kenabian yang bertugas mengatur kehidupan masyarakat serta memelihara, menjalankan dan mengembangkan agama. maka seorang pemimpin haruslah memiliki gagasan pemikiran yang baik, maju serta wawasan yang luas.¹²⁰

¹¹⁸ Zuhraini, "Kontribusi Nomkrasi Islam (*Rule Of Islamic Law*) Terhadap Negara Hukum Pancasila". *Jurnal Al-Adalah Vol.XII No.1*, (Bandar Lampung : Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 175(Online), tersedia di: <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>. (23 Juli 2019), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

¹¹⁹ 'Syarat Menjadi Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD' (On-line), tersedia di: <http://www.google.com/amp/s/gurupkn.com/syarat-menjadi-presiden-dan-wakil-presiden-menurut-uud/amp> di akses hari minggu, Tanggal 28 April 2019, pukul 23:15 wib

¹²⁰ *Ibid*, al-Mawardi, h. 11

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara terperinci dalam pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka ditarik suatu kesimpulan dengan rumusan masalah yang telah ditemukan yaitu :

Dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia harus melalui sebuah sistem yaitu sistem pemilihan umum, sistem pemilihan umum di Indonesia telah di atur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum merupakan salah satu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan menjalankan roda Pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyatnya. Dari segi kelembagaannya sistem pemilihan umum di tangani oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU). Di mana KPU sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pada umumnya KPU memiliki peran yang sangat penting untuk mengatur jalannya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan baik. Peranan tersebut tercantum di dalam peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 yang mana telah mengatur syarat-syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Adapun pandangan Islam terhadap peraturan KPU tentang Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden terdapat kesesuaian hal ini

bisa dilihat dari, sistem pemerintahan Islam menggunakan konsep musyawarah, persamaan, dan keadilan. Serta dalam menentukan pemimpin dalam islam harus memenuhi syarat-syarat seperti, amanah yaitu takut kepada Allah, tidak menjual ayat-ayat Allah, tidak curang dalam hal apa saja yang sebagaimana dimiliki oleh sifat Nabi Muhammad SAW. Pemimpin pula harus memiliki sifat Wara' yaitu kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercelan.

B. Saran

Setelah memahami kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Di dalam peraturaturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 pasal 9 terhadap persyaratan Presiden dan Wakil Presiden, tidak perlu terjadinya perubahan-perubahan karena dalam peraturan tersebut memiliki keselarasan dengan syariat Islam, yang mana Indonesia penduduknya mayoritas muslim, dalam sistemnya juga Indonesia menggunakan sistem demokrasi yang di mana kedaulatan berada di tangan rakyat.
2. Dalam peraturan Komisi pemilihan Umum terhadap persyaratan Presiden dan Wakil Presiden hendaknya perlu dimasukan syarat seperti jujur dan adil, karena di dalam peraturan tersebut tidak disebutkan secara jelas padahal kedua hal tersebut sangatlah penting dimiliki seorang presiden atau pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

A Djazuli, *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.

Abdul Rahman, H.I, *Sistem Politik Indonesia* Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007.

Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Anshar, 1997.

Abu Yala al-Farra, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-kutub al-Fikr, 1994.

Ahmad Fathi Bahansi, *Al-Siyasah al-Jina'iyah fi al-Syari'at al-Islam*, Mesir: Maktabah Dar al-Umdah, 1965.

Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta :LP3ES, 1985.

Al-Farabi, *al-Siyasah al-Madaniyah*, Beirut :Dar al-Masyriq, 1993.

Ali al-salus, *Imamah dan Khalifah*, Jakarta: Gema Insan Press, 1997.

Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, *penerjemah Fathurrahman dkk, dari al-jami li Ahkam al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, Padang:Angkasa Raya, 1990.

Anwar Arifin, *Politik Pencitraan* Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014.

Bintang R Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1989.

C.S.T. Kansil, *Memahami Pemilihan Umum dan Refereendum*, Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 1986

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahanny*, Jakarta: yayasan penyelenggaraan penterjemah al-Qur'an,

Farahdiba Rahma Bahtiar “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari berbagai Representasi”, *Jurnal Politik propetik Volume 3 no. 1 tahun* (2014).

H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2003.

Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Sastra Hudaya, 2005.

Hasan Ibrahim Hasan, *Islamic History and culture, From 632-1968*, terj. Djahdan Human Yogyakarta : Kota Kembang, 1989.

Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Shadr, 1968.

Ibn Taimiyah, *Minhaju al-sunnah al-Nabawiyyah*, Baulaq, tp, tt, jld I, h. 141-142.

Ibnu Qayyim al-Jawziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Islam*. Kairo: al-Mu’assasah al-Arabiyyah, 1961.

Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* terjemahan Khalifurrahman Fath & Fathurrahman Kairo: Darul Falah, 1973.

Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilu*, Yogyakarta, Rangkang, Education, 2014.

Janediri M. Gaffar. *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta : Konstitusi Press, 2012

Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Rajawali Press, 2012.

Louis bin Nakula Dhahir Ma’luf, *al-Munjid fi al-lughah wa al-A’lam*, Beirut: Dar al-Machreq sarl Publishers, 2000.

Louis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999.

Marshall Geh Lak, *Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kutai Kartanegara*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.4 No. 4 Pebruari 2016.

Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr, 1957.

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah-Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Muhammad Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem pemilihan Umum di Indonesia, Teori, Konsep dan Isus Strategis* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1990.

Munjar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama Erlangga, 2008.

Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam, (On-line) Tersediadi: <https://media.neliti.com/media/publications/12455-ID-pemilihan-umum-menurut-hukum-islam.pdf>, (Selasa 4 Desember 23:35 WIB).

Pengertian Pemilu, Tujuan, Fungsi, Syarat” (On-line), tersedia di: <http://www.informasiahli.com/2015/08/Pengertian-Pemilihan-Umum-Tujuan-Fungsi-Syarat.html> di akses hari Senin, Tanggal 18 Maret 2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 09.

PKK Universitas Kanjuruhan Malang, “Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2 No. 1 Juni 2009.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Grasindo, 1992.

Ridhwan Muhammad, *20 Prinsip Islam: Komentar Terhadap Imam Hasan Al-Banna*, terjemahan Ahmad Mudjab Mahali dari kitab *al-Aqaid Syariah Ushul li al-Isyrin li al-Syaba*, Solo: Ramadhani, 1992.

Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas Pemilu Legislatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta tahun 2016.

Sulthan Syahril, *Studi Islam tentang bela agama dan Negara*, Bandung : Iris Press, 2008.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, Lampung:LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Suyuti Pulungan, *Hukum TataNegara Islam*, Jakarta, Rajawali, 1997

Syarat Menjadi Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD' (On-line), tersedia di:<http://www.google.com/amp/s/gurupkn.com/syarat-menjadi-presiden-dan-wakil-presiden-menurut-uud/amp> di akses hari minggu, Tanggal 28 April 2019.

Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Taufiqi Rahman, *Moralitas Pemimpin dalam perspektifal-Qur'an*, Bandung: CV PustakaSetia, 1999.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen uud 1945*, Jakarta:Prenada Media Group, 2010.

Topo Santoso, Didik Supriyanto. *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi, Ed. I, Cet. I* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2018 tentang pemilihan umum, pasal 1

Veitzal, Et.al, *Pemimpin dan kepemimpinan dalam organisasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

[www. KPU.co.id](http://www.KPU.co.id), di akses pada tanggal 28 November 2018 pukul 01.16.
Yoyoh Rohaniah dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: Intrans Publishing, 2015

Zuhraini, "Kontribusi Nomkrasi Islam(*Rule Of Islamic Law*) Terhadap Negara Hukum Pancasila".*Jurnal Al-Adalah Vol.XII No.1*, (Bandar Lampung : Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 175(Online), tersedia di: <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>. (23 Juli 2019), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.